



Peta Rencana Pemerintah Digital 2026 - 2030



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum dan Kebijakan Nasional.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	3
1.4. Hubungan dengan Dokumen Lain	4
1.5. Ruang Lingkup	5
1.6. Sistematika Peta Rencana	6
BAB II PETA STRATEGI PEMERINTAH DIGITAL DAERAH	7
2.1. Visi dan Arah Kebijakan Pemerintah Digital	7
2.2. Misi Transformasi Digital Kabupaten Tanah Laut.....	9
2.3. Tujuan Transformasi Digital Kabupaten Tanah Laut	10
2.4. Sasaran Strategis & Indikator Kinerja Pemerintah Digital.....	11
2.5. Keterkaitan dengan RPJMD dan Strategi Nasional SPBE.....	15
2.6. Prinsip-prinsip Transformasi Digital Daerah	16
BAB III EVALUASI KONDISI SAAT INI (AS-IS) SPBE DAERAH	17
3.1. Hasil Evaluasi SPBE.....	17
3.2. Kondisi Aktual Implementasi SPBE.....	21
3.3. Organisasi Perangkat Daerah.....	21
3.4. Penerapan Aplikasi Layanan Publik dan Layanan Administrasi Pemerintahan	22
BAB IV PENGEMBANGAN PEMERINTAH DIGITAL	27
4.1. Indikator dan Tingkat Kematangan Pemerintah Digital.....	27
4.2. Pemetaan Matriks Pemerintah Digital	29
4.3. Kondisi Saat ini (<i>As-is</i>) Pemerintah Digital	31
BAB V ANALISIS KESENJANGAN (GAP ANALYSIS)	37
5.1. Kondisi Ideal (<i>To-be</i>) Pemerintah Digital	37
5.2. Analisis Kesenjangan (<i>Gap Analysis</i>) Pemerintah Digital	40
BAB VI STRATEGI TRANSFORMASI DIGITAL PEMERINTAH DAERAH	45
6.1. Strategi Peningkatan Tata Kelola Digital.....	45
6.2. Strategi Penyelenggaraan Pemerintah Digital	45

6.3.	Strategi Pembangunan Data	46
6.4.	Strategi Keamanan Siber	47
6.5.	Strategi Teknologi Digital	47
6.6.	Strategi Layanan Digital.....	48
6.7.	Strategi Kepuasan Pengguna	48
BAB VII	PETA RENCANA PEMERINTAH DIGITAL 2026–2030	50
7.1.	Roadmap Tahunan (2026–2030)	50
7.2.	Evaluasi dan Pengukuran Kepuasan Pemerintah Digital.....	57
7.2.1	Pengukuran Penilaian Pemerintah Digital	57
7.2.2	Skala Penilaian Kepuasan Pengguna	60
7.2.3	Translasi Skala: Menghubungkan Kepuasan Pengguna dengan Tingkat Kematangan	62
7.2.4	Konversi Nilai Kepuasan Pengguna ke Tingkat Kematangan.....	64
BAB VIII	PENUTUP	66
8.1.	Penegasan Visi dan Pijakan Awal Transformasi	66
8.2.	Rekomendasi Strategis untuk Kepemimpinan Daerah	66
8.3.	Komitmen dan Parameter Keberhasilan.....	67

DAFTAR GAMBAR

<i>Gambar 1. Skema Visi dan Arah Pembangunan Kabupaten Tanah Laut 2025–2029</i>	<i>10</i>
<i>Gambar 2. Nilai Indeks SPBE Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024</i>	<i>17</i>
<i>Gambar 3. Struktur Indeks Pemerintah Digital</i>	<i>28</i>
<i>Gambar 4. Translasi Skala Menghubungkan Kepuasan Pengguna dengan Tingkat Kematangan</i>	<i>62</i>

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Visi misi Transformasi Digital Kabupaten Tanah Laut	9
Tabel 2. Peta Sasaran Strategis & Indikator Kinerja Pemerintah Digital	11
Tabel 3. Kekuatan dan Kelemahan Aspek Penilaian SPBE Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024	19
Tabel 4. Kondisi Implementasi SPBE	21
Tabel 5. Daftar Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut	22
Tabel 6. Daftar Aplikasi Kolaborasi pada Portal Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	24
Tabel 7. Indikator dan Tingkat Kematangan Pemerintah Digital	27
Tabel 8. Pemetaan Matriks	29
Tabel 9. Kondisi Saat Ini (As-Is)	31
Tabel 10. Kondisi Ideal (To-be) Pemerintah Digital	38
Tabel 11. Kesenjangan (Gap Analysis) Pemerintah Digital	40
Tabel 12. Strategi Peningkatan Tata Kelola Digital	45
Tabel 13. Strategi Penyelenggaraan Pemerintah Digital	45
Tabel 14. Strategi Pembangunan Data	46
Tabel 15. Strategi Keamanan Siber	47
Tabel 16. Strategi Teknologi Digital	47
Tabel 17. Strategi Keterpaduan Layanan Digital	48
Tabel 18. Strategi Kepuasan Pengguna	49
Tabel 19. Roadmap Tahunan (2026–2030)	50
Tabel 20. Pengukuran Tingkat Kematangan dengan Skala 5	59
Tabel 21. Skala Penilaian Kepuasan Pengguna	60
Tabel 22. Konversi Nilai Kepuasan Pengguna	64

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemanfaatan **Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)** di lingkungan pemerintah daerah kini menjadi kebutuhan dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan modern. Melalui **Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pengembangan e-Government**, pemerintah telah memulai langkah transformasi digital untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang **efisien, efektif, transparan, dan akuntabel**.

Perkembangan TIK yang pesat telah mengubah cara masyarakat berinteraksi, bekerja, dan bertransaksi. Standar layanan yang cepat, mudah, dan berbasis digital kini menjadi tuntutan masyarakat terhadap pemerintah. Publik menuntut layanan yang setara dengan sektor swasta—mudah diakses, terintegrasi, serta dapat dipantau secara terbuka. Hal ini mendorong pemerintah untuk melakukan **transformasi digital secara menyeluruh** di seluruh aspek Bagian kasi dan pelayanan publik.

Sebagai respon terhadap perubahan tersebut, pemerintah menerbitkan **Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)** yang menjadi dasar penerapan tata kelola pemerintahan berbasis digital. SPBE menekankan pentingnya integrasi antar-perangkat daerah dan antar-tingkat pemerintahan, serta penggunaan data dan sistem yang saling terhubung untuk mendukung efisiensi Bagian kasi.

Transformasi digital pemerintah kemudian diperkuat dengan **Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional**, yang menegaskan arah pembangunan menuju pemerintahan digital yang terintegrasi (Digital Government). Dalam kerangka ini, teknologi tidak lagi hanya alat bantu administratif, tetapi telah menjadi **penggerak utama reformasi Bagian kasi dan inovasi pelayanan publik**.

Mulai tahun **2026**, pemerintah memperkenalkan **Indeks Pemerintah Digital (IPD)** sebagai pengganti **Indeks SPBE**, untuk mengukur tingkat kematangan digital pemerintah. IPD menilai kemampuan instansi dalam mengelola enam pilar utama:

1. **Tata Kelola Digital**
2. **Manajemen Layanan Digital**
3. **Teknologi dan Infrastruktur Digital**
4. **SDM dan Budaya Digital ASN**
5. **Layanan Publik Digital**
6. **Data dan Kecerdasan Buatan Pemerintah**

Transformasi digital bukan sekadar implementasi aplikasi, melainkan **perubahan sistemik terhadap cara kerja, budaya organisasi, dan pengambilan keputusan berbasis data**. Pemerintah daerah harus memastikan setiap inovasi digital mendukung integrasi layanan, peningkatan kinerja, serta kepuasan masyarakat.

Kabupaten Tanah Laut, memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan agenda **Pemerintah Digital Indonesia 2045**. Oleh karena itu, penyusunan **Peta Rencana Pemerintah Digital 2026–2030** ini menjadi langkah strategis untuk:

- Menetapkan arah dan prioritas pembangunan digital daerah;
- Mendorong integrasi sistem dan data antar-perangkat daerah;
- Memperkuat kompetensi digital ASN; dan
- Meningkatkan kualitas layanan publik digital yang adaptif dan inklusif.

Dengan adanya peta rencana ini, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut diharapkan mampu melaksanakan **transformasi digital yang terarah, terukur, dan berkelanjutan**, menuju Bagian kasi yang cerdas dan layanan publik berbasis data bagi seluruh masyarakat.

1.2. Dasar Hukum dan Kebijakan Nasional

1. Penyusunan Peta Rencana ini berpedoman pada berbagai regulasi dan kebijakan nasional, antara lain: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
9. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
14. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
15. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
16. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
17. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.
18. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Bagian krsi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Bagian krsi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko SPBE
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Bagian krsi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE
22. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Bagian krsi Nomor 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE
23. Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Bagian krsi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
24. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
25. Peraturan Presiden Nomor 174 Tahun 2024 tentang Kementerian Komunikasi dan Digital.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud:

Menyusun arah kebijakan, strategi, dan peta rencana implementasi **Pemerintah Digital Kabupaten Tanah Laut** untuk periode 2026–2030 sebagai panduan seluruh perangkat daerah dalam menyusun program dan kegiatan transformasi digital. Maksud dari Pendampingan Pengembangan Ekosistem SPBE Kabupaten Tanah Laut memberikan landasan berpikir, standarisasi, pentahapan, dan implementasi bagi pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang komprehensif, efisien, efektif, dan terpadu dalam bentuk :

1. Kerangka Pemikiran Dasar (SPBE *Framework*)
2. Rencana Strategis dan Tahapan Pembangunan SPBE Kabupaten Tanah Laut.

1.3.2 Tujuan:

1. Menyediakan acuan strategis bagi Pemerintah Daerah dalam mencapai Indeks Pemerintah Digital (IPD) sesuai target nasional.
2. Mengidentifikasi kondisi eksisting, kesenjangan, serta potensi daerah dalam penguatan tata kelola digital.
3. Menentukan program prioritas digitalisasi yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas layanan publik.
4. Membangun sinergi lintas sektor dalam pengelolaan data, infrastruktur, dan sumber daya digital.
5. Menjadi dasar perencanaan kegiatan digital dalam RKPD, Renstra OPD, dan dokumen pendukung perencanaan daerah lainnya.

1.4. Hubungan dengan Dokumen Lain

Peta Rencana Pemerintah Digital Kabupaten Tanah Laut Tahun 2026-2030 memiliki keterkaitan erat dan bersifat komplementer dengan dokumen perencanaan lainnya:

1. **RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029:** Peta Rencana ini merupakan **dokumen turunan tematik** yang menjabarkan secara lebih detail strategi dan program prioritas RPJMD, Implementasi Peta Rencana ini berkontribusi langsung pada pencapaian target IKU dan IKD yang relevan dalam RPJMD.
2. **Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah:** Peta Rencana ini menjadi **acuan** utama bagi Perangkat Daerah, terutama Dinas Komunikasi dan Informatika serta OPD terkait lainnya (Bappeda, Bagian Organisasi, BKD, Inspektorat, dll.), dalam menyusun tujuan, sasaran, program, dan kegiatan terkait SPBE dalam Renstra masing-masing.
3. **Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD):** Target dan program prioritas dalam Peta Rencana ini akan menjadi **masukan penting** dalam penyusunan RKPD tahunan, memastikan alokasi anggaran dan fokus kegiatan tahunan selaras dengan strategi digital jangka menengah.
4. **Arsitektur SPBE Kabupaten Tanah Laut:** Peta Rencana ini **berpedoman pada dan sekaligus menjadi dasar implementasi** Arsitektur SPBE (jika sudah/sedang disusun), memastikan keselarasan antara rencana strategis dengan rancangan teknis domain data dan informasi, infrastruktur, aplikasi, keamanan, dan layanan SPBE.
5. **RPJPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2045:** Peta Rencana ini merupakan bagian dari pelaksanaan **Tahap I RPJPD**, mendukung pencapaian visi jangka panjang Tanah Laut Sejahtera 2045 melalui transformasi tata kelola.

- 
6. **RPJMN Tahun 2025-2029 dan Kebijakan SPBE Nasional:** Peta Rencana ini **diselaraskan** dengan arah kebijakan pembangunan nasional, termasuk target SPBE nasional, DAN agenda transformasi digital,

1.5. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penyusunan Peta Rencana Pemerintah Digital Kabupaten Tanah Laut Tahun 2026-2030 ini mencakup serangkaian kegiatan strategis dan analitis, meliputi:

1. **Review dan Analisis Kontekstual:** Melakukan tinjauan terhadap dokumen perencanaan strategis yang relevan, termasuk RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029, RPJPD 2025-2045, kebijakan SPBE nasional (Perpres 95/2018 dan turunannya), serta Peta Rencana SPBE sebelumnya (jika ada), untuk memastikan keselarasan arah dan mandat.
2. **Evaluasi Kondisi Aktual (As-Is Analysis):** Melakukan penilaian mendalam terhadap kondisi penyelenggaraan SPBE Kabupaten Tanah Laut saat ini, mencakup analisis hasil evaluasi SPBE terakhir, pemetaan kapabilitas tata kelola, manajemen, infrastruktur, aplikasi, layanan digital, keamanan siber, dan sumber daya manusia TIK.
3. **Identifikasi Kesenjangan (Gap Analysis):** Menganalisis kesenjangan antara kondisi aktual SPBE dengan kondisi ideal yang diharapkan (To-Be) sesuai dengan visi, misi, sasaran strategis pemerintah digital, dan target RPJMD.
4. **Perumusan Strategi dan Program Kerja:** Merumuskan visi, misi, sasaran strategis, arah kebijakan, strategi prioritas, serta program kerja/kegiatan strategis pemerintah digital untuk periode 2026-2030 yang menjawab isu strategis dan kesenjangan yang teridentifikasi.

1.6. Sistematikan Peta Rencana

Dokumen Peta Rencana Pemerintah Digital Kabupaten Tanah Laut Tahun 2026-2030 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

- **BAB I PENDAHULUAN** Menguraikan latar belakang, dasar hukum dan kebijakan nasional yang relevan, maksud dan tujuan penyusunan Peta Rencana, serta ruang lingkup dan pendekatan yang digunakan.
- **BAB II PETA STRATEGI PEMERINTAH DIGITAL DAERAH** Menyajikan Visi dan Arah Kebijakan Pemerintah Digital, Misi Transformasi Digital Kabupaten Tanah Laut, Sasaran Strategis yang mengacu pada pilar SPBE, penjelasan Keterkaitan dengan RPJMD dan Strategi Nasional SPBE, serta Prinsip-prinsip Transformasi Digital Daerah.
- **BAB III EVALUASI KONDISI SAAT INI (AS-IS) SPBE DAERAH** Memaparkan Hasil Evaluasi SPBE terakhir, Kondisi Aktual Implementasi SPBE di lapangan, gambaran Organisasi Perangkat Daerah terkait SPBE, serta Penerapan Aplikasi Layanan Publik dan Layanan Administrasi Pemerintahan yang sudah berjalan.
- **BAB IV PENGEMBANGAN PEMERINTAH DIGITAL** Menjelaskan konsep Pemerintah Digital, dan Kondisi As-is Pemerintah Digital secara lebih mendalam.
- **BAB V ANALISIS KESENJANGAN (GAP ANALYSIS)** Menyajikan Kondisi Ideal penyelenggaraan SPBE yang diharapkan tercapai dan Analisis Kesenjangan antara kondisi ideal tersebut dengan kondisi aktual saat ini.
- **BAB VI STRATEGI TRANSFORMASI DIGITAL PEMERINTAH PROVINSI** Merumuskan strategi-strategi kunci untuk periode 2026-2030 yang mencakup Strategi Peningkatan Tata Kelola Digital, Penyelenggaraan Pemerintah Digital, Pembangunan Data, Keamanan Siber, Keterpaduan Layanan Digital, dan peningkatan Kepuasan Pengguna.
- **BAB VIII PENUTUP** Menyajikan rangkuman kesimpulan dari Peta Rencana dan rekomendasi strategis untuk implementasi selanjutnya

BAB II

PETA STRATEGI

PEMERINTAH DIGITAL DAERAH

2.1. Visi dan Arah Kebijakan Pemerintah Digital

Visi Pemerintah Digital Kabupaten Tanah Laut adalah derivasi fungsional dari Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, yaitu: **“Bersama Membangun Tanah Laut Simpun, Maju, dan Berkelanjutan”**.

Dalam konteks strategis digital, Visi ini diterjemahkan sebagai upaya mewujudkan **"Tata Kelola Pemerintahan yang Simpun (Tertata) Berbasis Elektronik, Pelayanan Publik yang Maju (Modern dan Aksesibel), dan Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan Berlandaskan Data dan Teknologi"**.

Kata kunci dalam Visi ini memiliki makna spesifik di ranah digital:

- **Simpun:** Mengacu pada **integrasi** sistem, **penyederhanaan** proses bisnis melalui arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dan **tata kelola** pemerintahan yang efisien dan akuntabel.
- **Maju:** Menekankan pada **inovasi** pelayanan publik, **pemanfaatan** teknologi mutakhir (seperti Kecerdasan Artifisial dan Big Data), dan peningkatan **kapasitas** SDM Aparatur yang berorientasi digital.
- **Berkelanjutan:** Berfokus pada **ketahanan** siber, **keamanan** data, dan **ekosistem** digital yang adaptif terhadap perubahan serta mendukung pembangunan ekonomi hijau dan kesejahteraan sosial jangka panjang.

Arah Kebijakan Pemerintah Digital

Arah Kebijakan Pemerintah Digital adalah pedoman utama untuk mencapai Visi. Kebijakan ini secara langsung mendukung Misi ke-3 RPJMD (*Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif Dan Dinamis*), yang diuraikan sebagai berikut:

1. **Pembangunan dan Konsolidasi Infrastruktur SPBE Daerah:** Memastikan ketersediaan jaringan konektivitas TIK yang andal, aman, dan merata, terutama di area *unserved* dan *underserved*. Ini termasuk penguatan *Data Center* dan *Cloud Computing* sebagai fondasi komputasi terpusat, serta penyediaan infrastruktur TIK di seluruh Perangkat Daerah (PD) dan unit layanan publik.
2. **Harmonisasi dan Integrasi Layanan Publik dan Administrasi Pemerintahan:** Mendorong percepatan implementasi layanan *Shared Services* dan aplikasi umum (seperti Satu Data



Indonesia, E-Office, dan Layanan Perizinan Terpadu) untuk menghilangkan *silo-silo* aplikasi dan mewujudkan pengalaman pengguna yang terpadu (*seamless experience*) dalam rangka peningkatan Indeks Pelayanan Publik.

3. **Peningkatan Kapasitas dan Literasi Digital SDM Aparatur:** Melaksanakan program pelatihan dan pengembangan kompetensi secara terstruktur dan berkelanjutan untuk memastikan SDM memiliki kapabilitas dalam mengoperasikan dan mengelola sistem SPBE, serta mendorong budaya inovasi Bagian kasi yang adaptif terhadap disrupti teknologi.
4. **Penguatan Keamanan Informasi dan Tata Kelola Data:** Mengimplementasikan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) dan fungsi persandian yang robust untuk melindungi aset informasi kritikal daerah. Kebijakan ini juga mencakup penetapan wali data dan produsen data untuk menjamin akurasi dan ketersediaan data statistik sektoral yang menjadi basis *data-driven policy making*.

2.2. Misi Transformasi Digital Kabupaten Tanah Laut

Untuk mewujudkan Visi, ditetapkan tiga Misi Transformasi Digital yang menjadi pilar strategis:

1. **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang Terpadu dan Berintegritas:** Misi ini berfokus pada reformasi proses bisnis pemerintahan. Hal ini dicapai melalui perancangan ulang (re-engineering) proses kerja dan pemanfaatan Arsitektur SPBE untuk mengintegrasikan seluruh domain aplikasi, mulai dari manajemen perencanaan, keuangan, kepegawaian, hingga pengawasan. Tujuannya adalah menciptakan Bagian krsi yang *paperless, cashless, and seamless* serta mendukung peningkatan nilai Indeks Reformasi Bagian krsi dan Indeks SPBE secara signifikan.
2. **Digitalisasi Pelayanan Publik yang Inklusif, Humanis, dan Berorientasi Kepuasan Masyarakat:** Misi ini bertujuan untuk merombak layanan konvensional menjadi layanan digital yang mudah diakses (multi-platform), cepat, dan transparan. Fokus utamanya adalah transformasi layanan *front-office* untuk layanan dasar (kependudukan, kesehatan, pendidikan) dan layanan perizinan, yang harus mampu menjangkau hingga pelosok desa (inklusif). Keberhasilan misi ini diukur dari peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan percepatan waktu layanan.
3. **Penguatan Ekosistem Inovasi Daerah dan Data sebagai Aset Strategis:** Misi ini menekankan pada pembangunan budaya inovasi, baik dari sisi teknologi maupun model layanan. Hal ini mencakup pembangunan *command center* atau pusat inovasi digital sebagai *hub* kolaborasi, serta implementasi prinsip *Satu Data Indonesia* di tingkat daerah. Data harus diperlakukan sebagai aset strategis yang diolah, dianalisis, dan disajikan sebagai informasi pembangunan yang akurat dan *real-time* untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat.

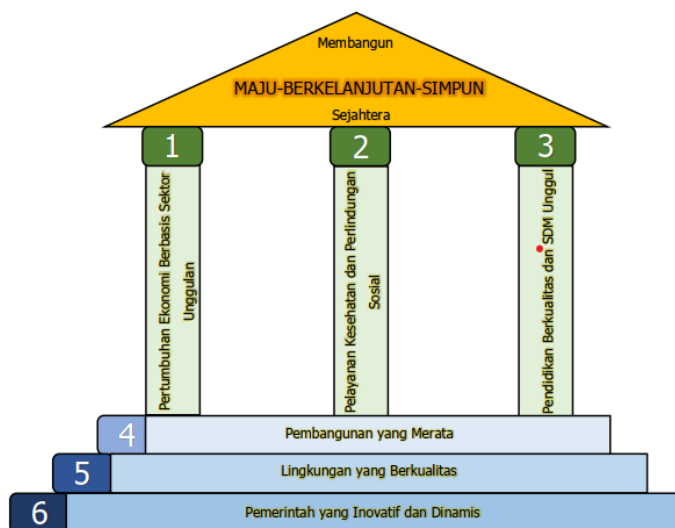
Tabel 1. Visi misi Transformasi Digital Kabupaten Tanah Laut

Visi	Misi
Bersama Membangun Tanah Laut Simpun, Maju, dan Berkelanjutan	1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan
	2. Mewujudkan Peningkatan Kesehatan yang Berkualitas, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	3. Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Keagamaan serta Kualitas SDM
	4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik
	5. Penataan Pembangunan Perkotaan dan Pedesaan
	6. Mewujudkan Lingkungan yang Berkualitas

2.3. Tujuan Tranformasi Digital Kabupaten Tanah Laut

Tujuan merupakan capaian jangka menengah yang lebih spesifik dan terukur dari pelaksanaan Misi Transformasi Digital.

1. **Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan SPBE menuju Predikat Sangat Baik:** Tujuan ini berorientasi pada pencapaian Indeks SPBE di atas target minimal nasional. Hal ini memerlukan penyelesaian Arsitektur SPBE Daerah, implementasi *Shared Services* secara penuh, serta penguatan domain kebijakan dan kelembagaan dalam SPBE. Capaian ini secara langsung berdampak pada efisiensi anggaran dan peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintahan.
2. **Terwujudnya Pelayanan Publik Digital yang Efektif, Efisien, dan Mendorong Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Daerah:** Tujuan ini mengukur dampak digitalisasi terhadap kualitas hidup masyarakat. Digitalisasi layanan dasar (e-Kesehatan, e-Pendidikan) dan layanan investasi akan mengurangi biaya transaksi masyarakat dan Bagian kras, mempercepat layanan, serta menciptakan iklim investasi yang kondusif, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan Indeks Pelayanan Publik dan Indeks Kepuasan Masyarakat.
3. **Meningkatnya Maturitas Tata Kelola Data dan Keamanan Informasi yang Mampu Menopang Ketahanan Siber Daerah:** Tujuan ini menekankan pada aspek *resilience* (ketahanan). Ini mencakup peningkatan nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) melalui implementasi standar data dan metadata, serta peningkatan Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah. Penguatan ini vital untuk menjamin integritas, ketersediaan, dan kerahasiaan data pemerintah di tengah ancaman siber yang terus berkembang.



Gambar 1. Skema Visi dan Arah Pembangunan Kabupaten Tanah Laut 2025–2029

2.4. Sasaran Strategis & Indikator Kinerja Pemerintah Digital

Sasaran Strategis digital diintegrasikan ke dalam Misi Pembangunan Daerah dan memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terukur dalam RPJMD 2025-2029. Berikut Adalah Tabel 2 Peta Strategi yang mengikat Sasaran Digital dengan Indikator Kinerja utamanya:

Tabel 2. Peta Sasaran Strategis & Indikator Kinerja Pemerintah Digital

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatkan Kualitas SDM Yang Unggul dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	73.42	73,50 – 74,00	74,00 – 75,00	74,30 – 75,30	75,00 – 76,00	75,50 – 76,50	76,00 – 77,00
		Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7.94	7.98	8	8.1	8.2	8.3	8.4
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	12.43	12.45	12.5	12.6	12.7	12.8	12.9
	Meningkatnya Derajat Kesehatan	Usia Harapan Hidup	Tahun	74.64	75	75.25	75.5	75.75	76	76.25
	Meningkatnya Kesejahteraan Gender	Indeks Ketimpangan Gender	Nilai	0.473	0.471	0.469	0.467	0.465	0.463	0.461
	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Pemuda	Indeks Pembangunan Pemuda	N/A							
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Laju Pertumbuhan Ekonomi		%	5.01	4,8 – 5,8	5.8	5.9	6	6.1	6.2
		Gini Ratio	Nilai	0.257	0,171 – 0,255	0,171 – 0,253	0,170 – 0,252	0,169 – 0,251	0,168 – 0,25	0,167 – 0,249
	Meningkatnya Rasio PDB Sektor Pertanian	Rasio PDB Sektor Pertanian	%	16.45	16.47	16.5	16.6	16.7	16.75	16.76

	Sektor Pertanian dan Perikanan	dan Perikanan								
	Unggulan Daerah	Rasio PDRB Sektor Industri Olahan	%	10.95	10.97	11	11.2	11.3	11.35	11.36
		Rasio PDRB Sektor Akomodasi dan Makan Minum (Pariwisata)	%	1.49	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2
		Rasio PDRB Sektor Perdagangan	%	10.72	10.75	10.76	10.77	10.78	10.79	10.8
	Meningkatnya realisasi investasi	Laju realisasi investasi	%	82.22	-40	4	4.5	5	6	7
	Menurunnya kemiskinan dan pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3.43	2,7 – 3,43	2,63 – 3,21	2,54 – 3,17	2,45 – 3,11	2,35 – 3,04	2,3 – 3
		Angka Kemiskinan	%	3.74	3,35 – 3,65	3,3 – 3,6	3,2 – 3,35	3,1 – 3,3	3,0 – 3,32	2,8 – 3,3
		Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Nilai	NA	NA	60	61	62	63	64
	Penurunan intensitas emisi GRK	Penurunan intensitas emisi GRK	%	NA	2.05	2.01	1.88	1.75	1.62	1.46
	Meningkatnya Pemerataan infrastruktur	Indeks Infrastruktur Daerah	Nilai	49.55	54.21	55	57	59	60	60
		Rasio Konektivitas	Nilai	0.71	0.71	0.79	0.88	0.88	0.88	0.88
	Unggulan Daerah	Rasio PDRB Sektor	%	10.95	10.97	11	11.2	11.3	11.35	11.36

		Industri Olahan								
		Rasio PDRB Sektor Akomodasi dan Makan Minum (Pariwisata)	%	1.49	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2
		Rasio PDRB Sektor Perdagangan	%	10.72	10.75	10.76	10.77	10.78	10.79	10.8
	Meningkatnya realisasi investasi	Laju realisasi investasi	%	82.22	-40	4	4.5	5	6	7
	Menurunnya kemiskinan dan pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3.43	2,7 – 3,43	2,63 – 3,21	2,54 – 3,17	2,45 – 3,11	2,35 – 3,04	2,3 – 3
		Angka Kemiskinan	%	3.74	3,35 – 3,65	3,3 – 3,6	3,2 – 3,35	3,1 – 3,3	3,0 – 3,32	2,8 – 3,3
		Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Nilai	NA	NA	60	61	62	63	64
	Penurunan intensitas emisi GRK	Penurunan intensitas emisi GRK	%	NA	2.05	2.01	1.88	1.75	1.62	1.46
	Meningkatnya Pemerataan infrastruktur	Indeks Infrastruktur Daerah	Nilai	49.55	54.21	55	57	59	60	60
		Rasio Konektivitas	Nilai	0.71	0.71	0.79	0.88	0.88	0.88	0.88
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	68.57	70.16	70.25	70.34	70.44	70.53	70.6
	Menurunnya risiko bencana	Indeks Risiko Bencana	Nilai	145.09	144	140	135	130	125	120

Meningkatkan Pemerintahan Yang adaptif dan melayani		Indeks Reformasi Bagian kras	Nilai	80.45	81	83	85	87	90	91
	Meningkatnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel	AKIP Kabupaten	Nilai	70.16	72	75	77	79	80	81
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai	79.645	79.7	80	80.5	81	81.5	82
		SPI	Nilai	78.97	79	79.01	79.02	79.03	79.04	79.05
	Meningkatnya Kualitas pelayanan publik berbasis digital	Indeks Pelayanan Publik	Nilai	4.23	4.4	4.45	4.5	4.55	4.6	4.65
		IKM	Nilai	88.41	88.6	89	89.3	90	90.3	91
		Indeks Pemerintah Digital	Nilai	NA	NA	1.7	1.7	2	2	2.3

Penjelasan Tambahan Indikator Kinerja:

- **Indeks SPBE dan Indeks Pemerintah Digital:** Peningkatan target menunjukkan komitmen untuk bertransformasi dari tahap *terkelola* menuju tahap **terpadu** (skor > 4.0). Hal ini membutuhkan investasi pada *sharing services*, *interoperabilitas* data, dan pembangunan *big data analytics* sederhana di tingkat daerah.
- **IKM dan Indeks Pelayanan Publik:** Peningkatan target ini merupakan cerminan dari keberhasilan digitalisasi dalam mengurangi waktu tunggu, menghilangkan pungutan liar, dan meningkatkan aksesibilitas layanan melalui *single sign-on* pada portal layanan terpadu.
- **Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi:** Nilai target yang semakin meningkat mencerminkan peningkatan maturitas daerah dalam merespons ancaman siber, yang

diwujudkan melalui pembentukan *Computer Security Incident Response Team* (CSIRT) daerah dan kepatuhan terhadap standar keamanan siber nasional.

2.5. Keterkaitan dengan RPJMD dan Strategi Nasional SPBE

Peta Strategi Pemerintah Digital Daerah Kabupaten Tanah Laut dirancang sebagai subsistem dari kerangka perencanaan yang lebih luas, baik di tingkat nasional maupun daerah.

- A. **Keterkaitan dengan RPJMD Kabupaten Tanah Laut 2025-2029:** Strategi ini adalah **instrumental** Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Dinamis. Seluruh program di bidang digital, seperti program pengelolaan aplikasi informatika dan penyelenggaraan persandian, adalah *enabler* utama untuk mencapai target IKU seperti **Indeks Reformasi Bagian kras** dan **Nilai SAKIP**. Transformasi digital memastikan bahwa tata kelola pemerintahan yang inovatif bukan hanya slogan, melainkan terwujud dalam sistem kerja yang otomatis dan terintegrasi.
- B. **Keterkaitan dengan Strategi Nasional SPBE (Perpres No. 132 Tahun 2022):** Peta strategi ini mengadopsi empat domain utama dalam Arsitektur SPBE Nasional, yaitu Layanan, Tata Kelola, Manajemen, dan Infrastruktur. Secara spesifik, Tanah Laut berkontribusi pada:
 - a. **Penyelenggaraan Layanan SPBE yang Terpadu:** Melalui adopsi layanan aplikasi umum (seperti sistem E-Office dan portal layanan publik) yang terintegrasi dengan Pusat Data Nasional (PDN).
 - b. **Peningkatan Kualitas Data:** Mendukung kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) melalui pembangunan *platform* data terpusat dan penunjukan Wali Data Daerah.
 - c. **Penguatan Keamanan Siber:** Menerapkan fungsi persandian dan membangun ketahanan siber sejalan dengan kerangka keamanan informasi nasional.

2.6. Prinsip-prinsip Transformasi Digital Daerah

Keberhasilan implementasi Peta Strategi ini didasarkan pada adherence terhadap prinsip-prinsip tata kelola yang kuat dan berkelanjutan:

1. **Prinsip Interoperabilitas dan Integrasi (Satu Sistem):** Transformasi harus menghindari pembangunan sistem yang **terisolasi (silo)**. Setiap aplikasi baru atau yang dikembangkan harus terintegrasi secara *mandatori* dengan Arsitektur SPBE Daerah, menggunakan *Application Programming Interface (API)* dan standar data yang disepakati. Tujuannya adalah menghilangkan redudansi data dan aplikasi, serta menciptakan ekosistem *Satu Sistem* yang efisien.
2. **Prinsip Data-Centric dan Privacy by Design:** Pengambilan keputusan harus **berbasis data (Data-Driven Policy)** yang valid dan andal (akurat, mutakhir, terpadu). Di saat yang sama, setiap pengembangan sistem harus menjamin **perlindungan data pribadi** masyarakat



(*Privacy by Design*), mematuhi regulasi perlindungan data, dan menerapkan standar keamanan tertinggi.

3. **Prinsip Inklusivitas dan Aksesibilitas:** Digitalisasi bukan hanya untuk aparat, tetapi juga untuk seluruh masyarakat. Prinsip ini memastikan bahwa layanan digital bersifat **aksesibel** bagi semua kalangan (termasuk penyandang disabilitas dan kelompok rentan) dan dapat menjangkau daerah dengan keterbatasan infrastruktur (blank spot) melalui solusi teknologi yang adaptif.
4. **Prinsip Adaptif dan Inovatif (*Agile Governance*):** Lingkungan digital berubah cepat. Pemerintah Daerah harus menerapkan tata kelola yang **adaptif** (*agile*) dan terbuka terhadap adopsi teknologi baru (misalnya, AI generatif untuk pelayanan publik) serta perbaikan berkelanjutan berdasarkan umpan balik kinerja dan survei kepuasan masyarakat.
5. **Prinsip Kolaborasi (*Pentahelix*):** Pengembangan ekosistem digital tidak dapat dilakukan sendiri. Prinsip ini menekankan **kemitraan** yang kuat antara Pemerintah Daerah, masyarakat (komunitas digital), akademisi, sektor swasta, dan media untuk bersama-sama menciptakan dan memanfaatkan inovasi teknologi.

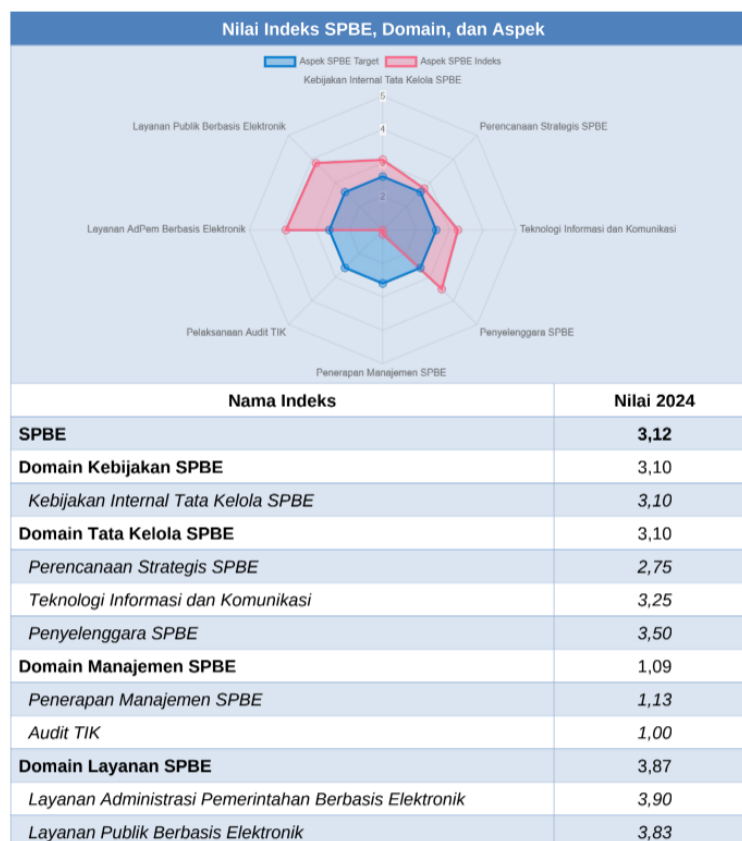
BAB III

EVALUASI KONDISI SAAT INI (AS-IS)

SPBE DAERAH

5.1. Hasil Evaluasi SPBE

Pada tahun 2024, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Bagian kras (PANRB) telah melaksanakan **evaluasi komprehensif** terhadap implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Penilaian ini secara metodologis mengkaji **empat domain fundamental SPBE**, yakni Kebijakan SPBE, Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Layanan SPBE. Hasil evaluasi menghasilkan **skor agregat Indeks SPBE sebesar 3,12**, yang detail capaian per domain dan aspeknya divisualisasikan pada Gambar 2.



Gambar 2. Nilai Indeks SPBE Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024

Indeks SPBE Kabupaten Tanah Laut secara keseluruhan pada tahun 2023 mencapai nilai **3,12** (dengan rentang 0-5). Nilai ini menempatkan Kabupaten Tanah Laut pada kategori kematangan **Terintegrasi**, yang menunjukkan adanya pelaksanaan SPBE secara komprehensif, terintegrasi, dan terstandardisasi di seluruh proses bisnis internal dan pelayanan publik.

Berdasarkan analisis hasil penilaian tersebut, dapat diidentifikasi tingkat kematangan pada masing-masing domain:

1. **Domain Kebijakan SPBE** secara konsisten mencapai nilai 3,10, menempatkannya pada tingkat kematangan Terintegrasi. Capaian ini mengindikasikan bahwa dasar-dasar regulasi internal yang menaungi seluruh kerangka kerja Tata Kelola SPBE telah diformulasikan, ditetapkan, dan diimplementasikan secara terintegrasi dan konsisten di seluruh unit kerja. Hal ini mencerminkan komitmen kepemimpinan yang kuat dalam menyediakan kerangka hukum yang memadai sebagai pondasi legalitas pelaksanaan transformasi digital daerah
2. **Domain Tata Kelola SPBE:** Domain Tata Kelola SPBE berada di tingkat kematangan **Terkelola** (2,80). Namun, terdapat disparitas kinerja yang signifikan pada sub-aspeknya: **Kekuatan:** Aspek **Penyelenggara SPBE** (3,50) dan **Teknologi Informasi dan Komunikasi** (3,00) telah mencapai tingkat **Terintegrasi**. Hal ini menunjukkan bahwa struktur organisasi dan peran pelaksana SPBE telah terdefinisi dengan jelas, didukung oleh tata kelola infrastruktur TIK yang mulai terstandardisasi. **Area Peningkatan:** Aspek **Perencanaan Strategis SPBE** masih berada di tingkat **Terkelola** (2,25). Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun sudah ada perencanaan, proses penyusunan peta jalan dan rencana induk TIK mungkin belum sepenuhnya terpadu dengan perencanaan bisnis PD secara keseluruhan, sehingga perlu dioptimalkan agar selaras dengan Visi dan Misi daerah
3. **Domain Manajemen SPBE:** Domain Manajemen SPBE merupakan domain dengan tingkat kematangan terendah (**Rintisan**, 1,55). Rendahnya nilai ini, terutama pada aspek **Penerapan Manajemen SPBE** (1,25), mengindikasikan bahwa proses-proses manajemen kunci seperti manajemen risiko, manajemen layanan, dan manajemen kinerja dalam siklus hidup SPBE masih bersifat *ad-hoc* atau insidental, belum terstruktur secara sistematis. Meskipun demikian, aspek **Audit TIK** telah mencapai tingkat **Terkelola** (2,33). Ini menunjukkan adanya kesadaran dan upaya untuk melakukan penilaian berkala terhadap fungsi dan kinerja TIK, namun hasilnya belum sepenuhnya digunakan sebagai masukan konsisten untuk perbaikan tata kelola dan manajemen SPBE secara menyeluruh.

4. **Domain Layanan SPBE:** Domain Layanan SPBE merupakan domain terkuat dengan nilai agregat **3,88 (Terintegrasi)**. Capaian ini didominasi oleh nilai sempurna **4,00** pada aspek **Layanan Publik Berbasis Elektronik.Kekuatan Utama:** Nilai 4,00 mengkategorikan layanan publik pada tingkat **Transaksional**, yang berarti layanan-layanan yang tersedia telah sepenuhnya memungkinkan **transaksi dua arah** dan **penyelesaian layanan secara elektronik** dari awal hingga akhir, sehingga memberikan manfaat langsung dan kemudahan bagi masyarakat. **Kualitas Internal:** Kematangan tinggi juga tercermin pada **Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik (3,80)**, yang menunjukkan bahwa proses-proses Bagian krsi internal (seperti E-Kearsipan, E-Anggaran, dan E-Kepegawaian) telah diotomatisasi dan terintegrasi secara substansial untuk mendukung efisiensi kerja pemerintah.

Kesimpulan Umum dan Fokus Perbaikan: Kabupaten Tanah Laut memiliki kekuatan utama yang jelas pada Layanan Publik Digital (mencapai Transaksional) dan dasar Kebijakan yang kuat. Namun, untuk mencapai Indeks SPBE yang lebih tinggi (> 4,00), fokus strategis harus diarahkan pada peningkatan Domain Manajemen SPBE (khususnya Penerapan Manajemen SPBE) dan mematangkan Perencanaan Strategis, untuk memastikan keberlanjutan dan ketahanan sistem (Aspek Resilience dan Continuity).

Tabel 3 berikut, menunjukkan kekuatan dan kelemahan untuk setiap aspek penerapan SPBE di Kabupaten Tanah Laut.

Tabel 3. Kekuatan dan Kelemahan Aspek Penilaian SPBE Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024

No.	Aspek Tata Kelola SPBE	Kekuatan (Strengths)	Kelemahan (Weaknesses)
A	Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	* Adanya Kebijakan Internal Manajemen Data dan Kebijakan Internal Audit TIK .	* Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE hanya memuat sebagian muatan (Tata Kelola SPBE, Layanan SPBE, TIK, SDM SPBE).
B	Perencanaan Strategis SPBE	* Pada aspek ini belum terlihat adanya kekuatan .	* Peta Rencana SPBE disusun hanya dengan memenuhi sebagian dari aspek Peta Rencana SPBE.
C	Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	* Layanan Jaringan Intra Instansi menjadi kekuatan. Dibuktikan sudah diterapkan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah dan sudah dievaluasi/direviu.	* Belum ada kelemahan pada aspek ini.
D	Penyelenggara SPBE	* Kolaborasi Penerapan SPBE menjadi kekuatan.	* Belum ada kelemahan pada aspek ini.

E	Penerapan Manajemen SPBE	* Belum ada indikator yang menjadi kekuatan.	* Penerapan Manajemen Risiko, Keamanan Informasi, Data, Aset TIK, Pengetahuan, Perubahan, dan Layanan SPBE dilaksanakan tanpa program terarah karena tidak tertuang dalam Peta Rencana SPBE. * Penerapan Kompetensi SDM belum memenuhi seluruh kompetensi SDM SPBE meskipun sudah selaras dengan Peta Rencana SPBE.
F	Pelaksanaan Audit TIK	* Belum ada aspek yang menjadi kekuatan.	* Pelaksanaan Audit Infrastruktur, Audit Aplikasi SPBE, dan Audit Keamanan SPBE dilakukan tanpa program kegiatan yang terencana karena tidak tertuang dalam Peta Rencana SPBE.
G	Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	* Layanan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan, Pengadaan Barang dan Jasa, Kepegawaian, Kearsipan Dinamis, Pengelolaan BMN/D, Akuntabilitas Kinerja Organisasi, dan Kinerja Pegawai menjadi kekuatan karena sudah menggunakan Aplikasi Umum Berbagi Pakai.	* Belum ada kelemahan pada aspek ini.
H	Layanan Publik Berbasis Elektronik	* Layanan Pengaduan Pelayanan Publik, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Layanan Publik Sektor 1, Sektor 2, dan Sektor 3 menjadi kekuatan.	* Belum ada kelemahan pada aspek ini.

5.2. Kondisi Aktual Implementasi SPBE

Kondisi kesiapan dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) berdasarkan penilaian kematangan Indeks SPBE oleh Kementerian PAN-RB pada tahun 2024 dapat ditunjukkan Tabel 4.

Tabel 4. Kondisi Implementasi SPBE

No	Indikator Tingkat Kematangan	Nilai Tingkat Kematangan 2024
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	4
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	3
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	3
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	3
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	4
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2
13	Tingkat Kematangan Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE	3
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	3
15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	3
16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	3
17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	4
18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
19	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	4
21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	1
22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	1
23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	1
24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	1

25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE	2
26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	1
27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	1
28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	1
29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	1
30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	1
31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	1
32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	4
33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	4
34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	4
35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	4
36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	4
37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	4
38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah	4
39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	3
40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	4
41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	4
42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	4
43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	3
44	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	4
45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	4
46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	4
47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	4

5.3. Organisasi Perangkat Daerah

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut memiliki Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ditunjukkan oleh Tabel 5 berikut.

Tabel 5. Daftar Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut

No	Organisasi Perangkat Daerah
1	BADAN PENDAPATAN DAERAH
2	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
3	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
4	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
5	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
6	DINAS KESEHATAN
7	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
8	DINAS PARIWISATA
9	DINAS SOSIAL

10	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
11	DINAS PERHUBUNGAN
12	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
13	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
14	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
15	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
16	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
17	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
18	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
19	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
20	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
21	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
22	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
23	INSPEKTORAT KABUPATEN
24	KECAMATAN BAJUIN
25	KECAMATAN BATI-BATI
26	KECAMATAN BATU AMPAR
27	KECAMATAN BUMI MAKMUR
28	KECAMATAN JORONG
29	KECAMATAN PELAIHARI
30	KECAMATAN TAKISUNG
31	KECAMATAN TAMBANG ULANG
32	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
33	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
34	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
35	UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HADJI BOEJASIN
36	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
37	SEKRETARIAT DAERAH
38	SEKRETARIAT DPRD
39	KECAMATAN KURAU
40	KECAMATAN PANYIPATAN
41	KECAMATAN KINTAP
42	KELURAHAN PELAIHARI
43	KELURAHAN ANGSAU
44	KELURAHAN KARANG TARUNA
45	KELURAHAN SARANG HALANG
46	KELURAHAN PABAHANAN

5.4. Penerapan Aplikasi Layanan Publik dan Layanan Administrasi Pemerintahan

Di setiap OPD mempunyai website yang bisa menjadi media informasi tiap-tiap OPD dan aplikasi internal administrasi pemerintahan dan layanan publik yang ada di Kabupaten Tanah Laut seperti ditunjukkan tabel 6.

Tabel 6. Daftar Aplikasi Kolaborasi pada Portal Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

No.	Nama Aplikasi	Jenis Aplikasi	Pemilik Aplikasi
1	SATU DATA TALA	Sistem Informasi Satu Data	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH (BAPPERIDA) / DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN (Diskominfo)
2	PPID	Sistem Informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN (Diskominfo)
3	Sosulita	Sistem Informasi Layanan Sosial dan Kesejahteraan	DINAS SOSIAL
4	Perizinan Online	Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Elektronik	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
5	SILAKAS	Sistem Informasi Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (Disdukcapil)
6	BAZNAS	Aplikasi Pengelolaan Zakat	- (Badan Amil Zakat Nasional)
7	LAPOR!	Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional	SEKRETARIAT DAERAH (Bagian Organisasi)
8	WOS	Sistem Informasi Administrasi Website & Sistem	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN (Diskominfo)
9	INFO BED RUMAH SAKIT	Sistem Informasi Ketersediaan Tempat Tidur Rumah Sakit	UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HADJI BOEJASIN / DINAS KESEHATAN
10	119 PUBLIC SAFETY CENTER	Layanan Panggilan Darurat dan Pusat Keselamatan Publik	DINAS KESEHATAN / BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)

11	102.3 TUNTUNG PANDANG FM	Media Informasi dan Penyiaran Publik	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN (Diskominfo)
12	ATENSI DISDIK TALA	Sistem Informasi Pelayanan Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
13	E-SAKIP	Sistem Informasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	SEKRETARIAT DAERAH (Bagian Organisasi) / BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
14	SIPD	Sistem Informasi Pembangunan Daerah	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH / BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
15	E-KINERJA	Sistem Informasi Penilaian Kinerja ASN	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (BKPSDM)
16	SINGGAH SEJUK	Sistem Informasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
17	SIGABSUS	Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
18	SI ENAK	Sistem Informasi E-Perizinan Komoditas Hulu	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
19	SIP OK	Sistem Informasi Pelayanan Publik Online Kelurahan	KELURAHAN / KECAMATAN
20	SIMISTIK	Sistem Informasi Manajemen Statistik Sektoral	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN (Diskominfo)
21	PELANGI	Sistem Informasi Pengaduan Layanan	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN (Diskominfo)
22	SIEKRAFU	Sistem Informasi Ekonomi Kreatif Pariwisata	DINAS PARIWISATA
23	SIMFEDNI	Sistem Informasi Manajemen Forum	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN (Diskominfo)

		Ekonomi Digital Nasional Indonesia	
24	SIMPEG	Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (BKPSDM)
25	SRIADI	Sistem Informasi Pelaporan Penerimaan Bantuan Daerah	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD)
26	NetControl	Sistem Informasi Jaringan dan Kontrol Infrastruktur IT	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN (Diskominfo)
27	SI-PERMATA	Sistem Informasi Pengelolaan Data Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
28	SANAK KAWAN	Sistem Informasi Layanan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
29	SIGuna	Sistem Informasi Hutang Piutang Simpanan Koperasi	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
30	OASIS	Sistem Informasi Ekosistem Kewirausahaan dan UMKM	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
31	SIDAQOHTANYARI	Sistem Informasi Kearsipan Digital dan Pengarsipan	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN / SEKRETARIAT DAERAH

BAB IV PENGEMBANGAN PEMERINTAH DIGITAL

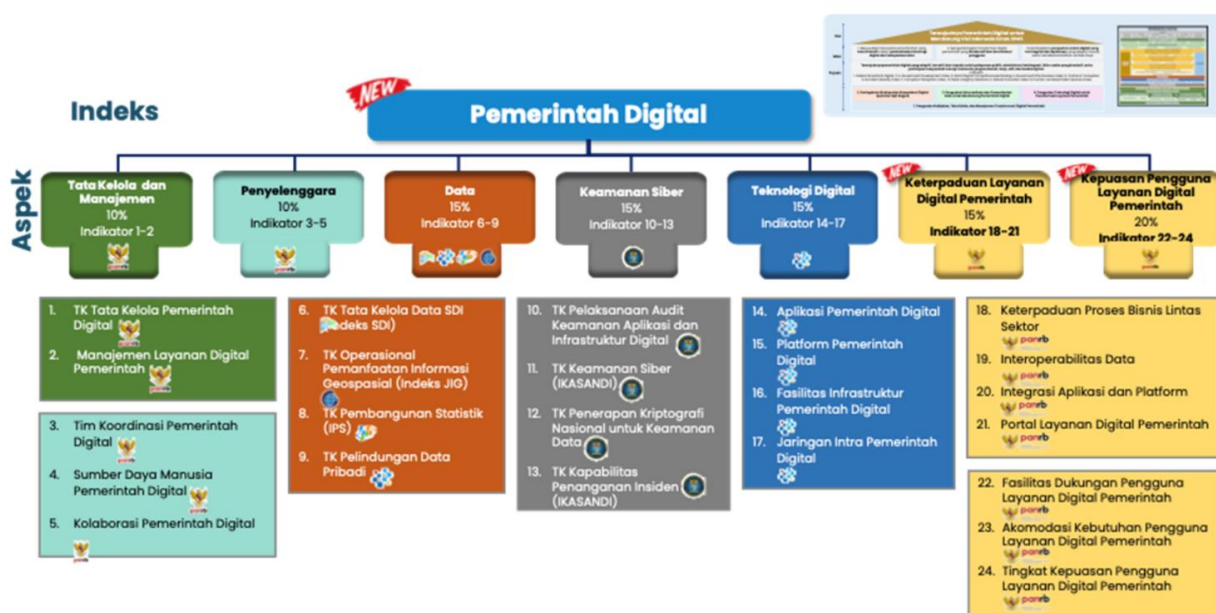
4.1. Indikator dan Tingkat Kematangan Pemerintah Digital

Berikut merupakan hasil penilaian awal terhadap tingkat kematangan *Pemerintah Digital* berdasarkan indikator dan aspek yang mengacu pada Indeks SPBE seperti yang ditunjukkan pada tabel 7.

Tabel 7. Indikator dan Tingkat Kematangan Pemerintah Digital

No.	Indikator	TK
	Tata Kelola dan Manajemen	1
1	TK Tata Kelola Pemerintah Digital	1
2	TK Manajemen Layanan Digital Pemerintah	1
	Penyelenggara	1
3	Tim Koordinasi Pemerintah Digital	1
4	Sumber Daya Manusia Pemerintah Digital	1
5	Kolaborasi Pemerintah Digital	1
	Data	1
6	TK Tata Kelola Data SDI (Indeks SDI)	1
7	TK Operasional Pemanfaatan Informasi Geospasial (Indeks JIG)	1
8	TK Pembangunan Statistik (IPS)	1
9	TK Pelindungan Data Pribadi	1
	Keamanan Siber	1
10	TK Pelaksanaan Audit Keamanan Aplikasi dan Infrastruktur Digital	1
11	TK Keamanan Siber (IKASANDI)	1
12	TK Penerapan Kriptografi Nasional untuk Keamanan Data	1
13	TK Kapabilitas Penanganan Insiden (IKASANDI)	1
	Teknologi Digital	1
14	Aplikasi Pemerintah Digital	1
15	Platform Pemerintah Digital	1
16	Fasilitas Infrastruktur Pemerintah Digital	1
17	Jaringan Intra Pemerintah Digital	1
	Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah	1
18	Keterpaduan Proses Bisnis Lintas Sektor	1
19	Interoperabilitas Data	1

20	Integrasi Aplikasi dan Platform	1
21	Portal Layanan Digital Pemerintah	1
	Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah	1
22	Fasilitas Dukungan Pengguna Layanan Digital Pemerintah	1
23	Akomodasi Kebutuhan Pengguna Layanan Digital Pemerintah	1
24	Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah	1



Gambar 3. Struktur Indeks Pemerintah Digital

Gambar 3 diatas menunjukkan struktur Indeks Pemerintah Digital yang merupakan bagian dari RPJMN 2025–2029, terdiri atas enam aspek utama: *Tata Kelola dan Manajemen*, *Penyelenggara*, *Data*, *Keamanan Siber*, *Teknologi Digital*, serta *Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah*. Masing-masing aspek memiliki indikator penilaian yang mendukung pengukuran tingkat kematangan transformasi digital pemerintah.

4.2. Pemetaan Matriks Pemerintah Digital

Berikut disajikan hasil pemetaan matriks berdasarkan aspek, muatan, indikator, dan penanggung jawab utama sebagaimana tercantum pada Tabel 8.

Tabel 8. Pemetaan Matriks

Aspek	No	Indikator / Komponen	PIC Utama	Indeks SPBE
A. TATA KELOLA & MANAJEMEN	1	TK Tata Kelola Pemerintah Digital	Bagian Organisasi	Aspek 2
	2	TK Manajemen Layanan Digital Pemerintah	Diskominfo Bidang Aplikasi Informatika	Aspek 5
B. PENYELENGGAR A	3	Tim Koordinasi Pemerintah Digital	Sekretaris Daerah	Baru
	4	Sumber Daya Manusia Pemerintah Digital	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Baru
	5	Kolaborasi Pemerintah Digital	Diskominfo Bidang Aplikasi Informatika	Ind 20
C. DATA	6	TK Tata Kelola Data SDI	Diskominfo Bidang Statistik	Baru
	7	TK Pemanfaatan Informasi Geospasial	Diskominfo Bidang Statistik	Baru
	8	TK Pembangunan Statistik	Diskominfo Bidang Statistik	Baru
	9	TK Pelindungan Data Pribadi	Diskominfo Bidang TIK & Persandian	Baru

D. KEAMANAN SIBER	10	TK Pelaksanaan Audit Keamanan	Inspektorat Daerah	Ind 31
	11	TK Keamanan Siber (IKASANDI)	Diskominfo Bidang TIK & Persandian	Ind 22
	12	TK Penerapan Kriptografi	Diskominfo Bidang TIK & Persandian	Baru
	13	TK Kapabilitas Penanganan Insiden	Diskominfo Bidang TIK & Persandian	Baru
E. TEKNOLOGI DIGITAL	14	Aplikasi Pemerintah Digital	Diskominfo Bidang Aplikasi Informatika	Ind 15
	15	Platform Pemerintah Digital	Diskominfo Bidang TIK & Persandian	Baru
	16	Fasilitas Infrastruktur Digital	Diskominfo Bidang TIK & Persandian	Ind 16
	17	Jaringan Intra Pemerintah Digital	Diskominfo Bidang TIK & Persandian	Baru
F. KETERPADUAN LAYANAN DIGITAL	18	Keterpaduan Proses Bisnis	Bagian Organisasi	Ind 14
	19	Interoperabilitas Data	Diskominfo Bidang Aplikasi Informatika	Ind 18
	20	Integrasi Aplikasi & Platform	Diskominfo Bidang Aplikasi Informatika	Baru
	21	Portal Layanan Digital Pemerintah	Diskominfo Bidang IKP & Kehumasan	Baru

G. KEPUASAN PENGGUNA	22	Fasilitas Dukungan Pengguna	Bagian Organisasi	Baru
	23	Akomodasi Kebutuhan Pengguna	Diskominfo Bidang IKP & Kehumasan	Baru
	24	Tingkat Kepuasan Pengguna	Diskominfo Bidang IKP & Kehumasan	Baru

4.3. Kondisi Saat ini (*As-is*) Pemerintah Digital

Berikut merupakan hasil pemetaan kondisi saat ini (*As-Is*) Pemerintah Digital berdasarkan aspek, indikator, dan kondisi aktual pada masing-masing unit terkait sebagaimana disajikan dalam Tabel 9.

Tabel 9. Kondisi Saat Ini (*As-Is*)

Aspek	No	Indikator	PIC Utama	Kondisi Aktual (Cleaned)
A. TATA KELOLA & MANAJEMEN	1	TK Tata Kelola Pemerintah Digital	Bagian Organisasi	Sudah terdapat Perbup SPBE sebagai kebijakan formal dan telah dibentuk SK Tim SPBE yang berfungsi menjalankan tata kelola digital di tingkat kabupaten.
	2	TK Manajemen Layanan Digital Pemerintah	Diskominfo Bidang Aplikasi Informatika	Sudah ada SOP Layanan Digital yang mencakup SLA. Evaluasi dilakukan melalui rapat SPBE, dengan PIC disesuaikan pada masing-masing unit kerja.
B. PENYELENGGARA	3	Tim Koordinasi Pemerintah Digital	Sekretaris Daerah	Tim koordinasi telah terbentuk dan aktif melakukan forum diskusi sesuai konteks materi SPBE, meskipun belum memiliki jadwal rapat yang baku.
	4	Sumber Daya Manusia	Badan Pengembangan Sumber	Tim IT telah dibentuk melalui SK Tim IT di Diskominfo. Terdapat 46 pranata komputer tersebar

		Pemerintah Digital	Daya Manusia	di beberapa OPD. Pelatihan IT dilakukan melalui BKPSDM dan Kominfo, namun belum ada database terintegrasi terkait pelatihan/sertifikasi SPBE.
	5	Kolaborasi Pemerintah Digital	Diskominfo Bidang Aplikasi Informatika	Belum ada informasi lengkap mengenai bentuk atau dokumen kolaborasi lintas sektor; MoU dan nota kesepahaman perlu dihimpun kembali sebagai bukti kerja sama digital.
C. DATA	6	TK Tata Kelola Data SDI	Diskominfo Bidang Statistik	Data sektoral telah tersedia di portal Satu Data Daerah dan memiliki metadata. Belum terhubung dengan portal nasional data.go.id, namun direncanakan bergabung dengan Satu Data Daerah. Pembaruan dilakukan tahunan.
	7	TK Pemanfaatan Informasi Geospasial	Diskominfo Bidang Statistik	Sistem GIS aktif digunakan untuk pemetaan bencana dan blank spot Kominfo. Integrasi dilakukan dengan portal Daerah, diperbarui setiap tahun. Infrastruktur disediakan oleh Diskominfo.
	8	TK Pembangunan Statistik	Diskominfo Bidang Statistik	Statistik sektoral terbuka di portal data.tanahlautkab.go.id, sudah diverifikasi BPS, dan dipublikasikan tiap tahun (April) dengan koordinasi Bapperida.
	9	TK Pelindungan Data Pribadi	Diskominfo Bidang TIK & Persandian	Rancangan Perbup Perlindungan Data sedang disusun. Belum pernah ada sosialisasi UU PDP. Pernah mengalami serangan ransomware; rencana

				sosialisasi dimulai tahun 2026.
D. KEAMANAN SIBER	10	TK Pelaksanaan Audit Keamanan	Inspektorat Daerah	Audit TIK terakhir dilakukan 2024 menggunakan tools BRIN. Rencana audit aplikasi dengan tools BSSN pada 2025 telah dimasukkan dalam Peta Rencana SPBE.
	11	TK Keamanan Siber (IKASANDI)	Diskominfo Bidang TIK & Persandian	SK CSIRT telah ada (12 anggota) dengan agen siber di tiap OPD. SOP keamanan ada namun belum lengkap dan masih berstandar ISO 27001:2013. Simulasi insiden baru dilakukan di tingkat Daerah.
	12	TK Penerapan Kriptografi	Diskominfo Bidang TIK & Persandian	Penggunaan SSL/TLS dan Tanda Tangan Elektronik (TTE) sudah diterapkan pada sebagian besar aplikasi.
	13	TK Kapabilitas Penanganan Insiden	Diskominfo Bidang TIK & Persandian	Belum pernah dilakukan simulasi keamanan internal; penanganan insiden dilakukan secara reaktif saat kasus terjadi.
E. TEKNOLOGI DIGITAL	14	Aplikasi Pemerintah Digital	Diskominfo Bidang Aplikasi Informatika	Terdapat 33 aplikasi aktif di portal.tanahlautkab.go.id, sebagian besar masih silo. Tiga aplikasi sudah berbagi data (SIMPEG, Pelangi, Simfoni). Tidak ada tumpang tindih aplikasi.
	15	Platform Pemerintah Digital	Diskominfo Bidang TIK & Persandian	Beberapa layanan (SPLP, SIMPEG, absensi) telah menggunakan API Gateway dan cloud. Namun integrasi masih terbatas karena akses VPN dan keterbatasan infrastruktur.

	16	Fasilitas Infrastruktur Digital	Diskominfo Bidang TIK & Persandian	Telah memiliki data center sendiri, namun belum berstandar TIER. Sebagian backup dilakukan di PDN Surabaya; DRP belum tersedia.
	17	Jaringan Intra Pemerintah Digital	Diskominfo Bidang TIK & Persandian	Seluruh OPD terhubung jaringan intra kecuali beberapa kecamatan jauh. Kualitas baik, dengan monitoring real-time di internet.tanahlautkab.go.id . Pernah terjadi downtime massal akibat penggalian kabel.
F. KETERPADUAN LAYANAN DIGITAL	18	Keterpaduan Proses Bisnis	Bagian Organisasi	Peta proses bisnis 2023 sudah disusun, namun belum divisualisasikan. Rencana pembaruan 2025 akan menyertakan notasi proses bisnis dan forum diskusi lintas OPD.
	19	Interoperabilitas Data	Diskominfo Bidang Aplikasi Informatika	Menggunakan format API SPLP (JSON/XML) dengan Kong Gateway. Belum memiliki sistem API Management terpusat.
	20	Integrasi Aplikasi & Platform	Diskominfo Bidang Aplikasi Informatika	Belum semua aplikasi interoperable. Kendala: jika satu aplikasi down, berdampak pada lain. Rencana integrasi diarahkan ke MPP Digital dan layanan rumah sakit serta Dapodik.
	21	Portal Layanan Digital Pemerintah	Diskominfo Bidang IKP & Kehumasan	Portal.tanahlautkab.go.id dan PPID telah tersedia, bersifat informatif. Statistik pengguna portal belum tersedia, sementara PPID sudah memiliki statistiknya.

G. KEPUASAN PENGGUNA	22	Fasilitas Dukungan Pengguna	Bagian Organisasi	Survei kepuasan dilakukan triwulan via Google Form dan dilaporkan ke KemenPANRB. Hasil belum dipublikasikan; tiap SKPD mengelola publikasinya sendiri.
	23	Akomodasi Kebutuhan Pengguna	Diskominfo Bidang IKP & Kehumasan	Belum pernah dilakukan FGD resmi. Portal Tanah Laut sudah mendekati kebutuhan masyarakat, dan tahun depan direncanakan kegiatan konsultasi publik.
	24	Tingkat Kepuasan Pengguna	Diskominfo Bidang IKP & Kehumasan	Survei IKM dilakukan triwulan dan dikelola sekretariat. Nilai kepuasan meningkat pada dua triwulan 2025. Tindak lanjut dilakukan oleh masing-masing SKPD.
A. TATA KELOLA & MANAJEMEN	25	TK Strategi Transformasi Digital Pemerintah	Bappeda	Draft strategi dan roadmap transformasi digital masih dalam tahap penyusunan, belum terdokumentasi resmi dalam RPJMD/Renstra.
	26	TK Inovasi Proses Bisnis Tematik	Bagian Organisasi	Belum terdapat inovasi proses bisnis tematik yang terdokumentasi. Rencana inovasi dari KemenPANRB tertunda karena masalah koordinasi dan pemahaman teknis.
	27	TK Arsitektur Pemerintah Digital	Diskominfo Bidang Aplikasi Informatika	Dokumen arsitektur SPBE sudah ada namun memerlukan review dan pembaruan agar selaras dengan proses bisnis terbaru.
	28	TK Peta Rencana	Diskominfo Bidang	Peta Rencana Pemerintah Digital sedang dalam proses

		Pemerintah Digital	Aplikasi Informatika	penyusunan dan sudah dimasukkan dalam dokumen transformasi digital daerah.
	29	TK Keterpaduan Rencana dan Anggaran Pemerintah Digital	Bappeda + BPKAD	Integrasi program SPBE dengan RKPD/RPJMD belum terwujud; penganggaran SPBE masih terpisah dan belum teralokasi khusus

BAB V

ANALISIS KESENJANGAN (GAP ANALYSIS)

Analisis kesenjangan (Gap Analysis) merupakan tahapan krusial dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Bab ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengukur diskrepansi antara kondisi pembangunan aktual Kabupaten Tanah Laut saat ini dengan kondisi ideal yang diharapkan tercapai pada akhir periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029. Pemahaman mendalam mengenai kesenjangan ini menjadi landasan fundamental dalam merumuskan strategi, arah kebijakan, dan program prioritas yang lebih tepat sasaran dan efektif, sebagaimana diuraikan dalam Bab V. Analisis ini membandingkan data capaian pembangunan terkini, yang disajikan dalam Kondisi Aktual (Bab IV) dan hasil evaluasi periode sebelumnya, dengan target-target kinerja yang telah ditetapkan dalam sasaran pembangunan RPJMD ini.

5.1. Kondisi Ideal (*To-be*) Pemerintah Digital

Kondisi ideal Pemerintah Digital Kabupaten Tanah Laut pada akhir periode perencanaan tahun 2029 merupakan manifestasi dari Visi "Bersama Membangun Tanah Laut Simpun, Maju, dan Berkelanjutan," yang diprioritaskan pada penguatan tata kelola dan reformasi Bagian krasi. Pencapaian ini ditandai dengan matangnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang ditargetkan mencapai nilai 4,00 (kategori Sangat Baik), menandakan seluruh proses bisnis internal telah Terintegrasi dan terotomatisasi secara end-to-end. Dukungan kebijakan digital yang kuat menghasilkan peningkatan Indeks Reformasi Bagian krasi (IRB) hingga 90, mencerminkan Bagian krasi yang ramping, akuntabel, dan efisien, didukung oleh infrastruktur TIK yang andal dan terstandarisasi.

Pencapaian tata kelola digital ini menghasilkan dampak langsung pada kualitas pelayanan publik yang bertransformasi menjadi Transaksional dan inklusif, dengan target Indeks Pelayanan Publik mencapai 4,60 dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 90,30. Di sisi keberlanjutan dan ketahanan, daerah berhasil mengukuhkan data sebagai aset strategis dengan mencapai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) 2,70, menjamin kebijakan berbasis data yang akurat dan terpadu. Lebih lanjut, ketahanan siber terjamin dengan Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi mencapai 477, memastikan perlindungan optimal terhadap data dan aset digital pemerintah di tengah ancaman yang terus berkembang.

Tabel 10. Kondisi Ideal (To-be) Pemerintah Digital

Aspek	No	Indikator	Kondisi Ideal/target
A. TATA KELOLA & MANAJEMEN	1	TK Tata Kelola Pemerintah Digital	Tata kelola digital matang, terstandardisasi, dan terintegrasi; seluruh pengambilan keputusan berbasis data dengan mekanisme pengawasan real-time. Memiliki Dokumen Strategi Transformasi Digital Pemerintah, Arsitektur Pemdi, Peta Rencana Pemdi, Inovasi Proses Bisnis Tematik, Keterpaduan Rencana dan Anggaran Pemerintah Digital
	2	TK Manajemen Layanan Digital Pemerintah	Seluruh layanan digital Memiliki Pedoman pelaksanaan Manajemen Aset TIK, Manajemen Pengetahuan, dan Manajemen Perubahan, Penerapan Manajemen Risiko dan Keberlangsungan
B. PENYELENGGARA	3	Tim Koordinasi Pemerintah Digital	Tim koordinasi aktif dengan rapat rutin, dashboard monitoring kinerja, dan evaluasi tahunan berbasis data lintas sektor.
	4	Sumber Daya Manusia Pemerintah Digital	Seluruh ASN memiliki sertifikasi digital minimal level dasar; pengelola TIK bersertifikasi nasional/internasional; pelatihan berkelanjutan tersedia.
	5	Kolaborasi Pemerintah Digital	Jejaring kolaborasi aktif dengan akademisi/industri; minimal 3 program inovasi kolaboratif berjalan setiap tahun.
C. DATA	6	TK Tata Kelola Data SDI	Satu Data berjalan penuh; metadata lengkap; portal data terintegrasi dengan nasional; kualitas data terukur secara berkala.
	7	TK Pemanfaatan Informasi Geospasial	Pemanfaatan IG terintegrasi di seluruh OPD; dashboard geospasial analitis tersedia; data IG mutakhir.
	8	TK Pembangunan Statistik	Statistik sektoral standar BPS; proses statistik terdigitalisasi; indikator kinerja data tersedia real-time.

	9	TK Pelindungan Data Pribadi	Penerapan PDP fully compliant; seluruh aplikasi memiliki DPIA; insiden PDP <1% per tahun.
D. KEAMANAN SIBER	10	TK Pelaksanaan Audit Keamanan	Audit keamanan rutin tahunan; seluruh aplikasi strategis lulus audit; rekomendasi audit terpenuhi >90%.
	11	TK Keamanan Siber (IKASANDI)	IKASANDI level “baik/sangat baik”; SOC/CSIRT aktif 24/7; keamanan siber proaktif berbasis risk-based approach.
	12	TK Penerapan Kriptografi	Seluruh layanan digital memakai enkripsi standar nasional; manajemen kunci terpusat; audit krypto tahunan berjalan.
	13	TK Kapabilitas Penanganan Insiden	CSIRT matang; waktu respon insiden <4 jam; insiden kritis turun >50%.
E. TEKNOLOGI DIGITAL	14	Aplikasi Pemerintah Digital	Semua aplikasi prioritas terintegrasi; standar API diterapkan; tidak ada aplikasi duplikasi; uptime >99%.
	15	Platform Pemerintah Digital	Platform terpadu berjalan penuh; Single Sign-On aktif; integrasi lintas aplikasi otomatis.
	16	Fasilitas Infrastruktur Digital	Infrastruktur hybrid cloud; pusat data sesuai standar tier; backup otomatis; DRP & BCP berjalan.
	17	Jaringan Intra Pemerintah Digital	Jaringan aman, segmented, encrypted; monitoring real-time; bandwidth cukup; zero-downtime network.
F. KETERPADUAN LAYANAN DIGITAL	18	Keterpaduan Proses Bisnis	Proses bisnis lintas sektor tersinkronisasi; mendukung layanan end-to-end; dokumentasi lengkap & update berkala.
	19	Interoperabilitas Data	Standar interoperabilitas diterapkan; semua aplikasi strategis terhubung via API; data konsisten dan aman.

	20	Integrasi Aplikasi & Platform	Seluruh platform/aplikasi prioritas terhubung; SSO berjalan; integrasi dilakukan otomatis berdasarkan standar arsitektur.
	21	Portal Layanan Digital Pemerintah	Satu portal layanan lengkap, UX modern, mobile friendly; integrasi penuh dengan portal nasional.
G. KEPUASAN PENGGUNA	22	Fasilitas Dukungan Pengguna	Helpdesk 24/7; sistem tiket digital; respons <1 jam; dokumentasi lengkap; feedback loop otomatis.
	23	Akomodasi Kebutuhan Pengguna	Survei rutin; co-creation dengan pengguna; perbaikan layanan sesuai data real.
	24	Tingkat Kepuasan Pengguna	Indeks kepuasan >85%; dashboard kepuasan terintegrasi; keluhan turun 40%.

5.2. Analisis Kesenjangan (*Gap Analysis*) Pemerintah Digital

Analisis kesenjangan dilakukan dengan membandingkan secara sistematis antara Kondisi Ideal (target kinerja tahun 2029) sebagaimana dijelaskan pada subbab 5.1, dengan Kondisi Awal atau *baseline* pembangunan pada tahun 2024 (atau data terakhir yang tersedia) yang telah dipaparkan secara detail dalam Bab II. Kesenjangan (gap) ini merepresentasikan tantangan pembangunan yang harus diatasi selama periode RPJMD 2025-2029 melalui implementasi strategi, arah kebijakan, dan program prioritas yang telah dirancang.

Besaran kesenjangan menunjukkan seberapa besar upaya dan sumber daya yang perlu dimobilisasi untuk mencapai target yang telah ditetapkan pada tabel 11.

Tabel 11. Kesenjangan (*Gap Analysis*) Pemerintah Digital

Aspek	No	Indikator	Kesenjangan
A. TATA KELOLA & MANAJEMEN	1	TK Tata Kelola Pemerintah Digital	Pengambilan Keputusan: Belum berbasis data secara real-time. Keterpaduan Dokumen: Belum memiliki dokumen Strategi Transformasi Digital, Arsitektur, Peta Rencana,

			dan Keterpaduan Anggaran yang terintegrasi
	2	TK Manajemen Layanan Digital Pemerintah	Dokumentasi Manajemen: Belum memiliki Pedoman formal untuk Manajemen Aset TIK, Manajemen Pengetahuan, Manajemen Perubahan, dan Manajemen Risiko.
B. PENYELENGGARA	3	Tim Koordinasi Pemerintah Digital	Formalitas & Integrasi: Strategi belum ditetapkan resmi (draft) dan belum selaras/terdokumentasi dalam RPJMD/Renstra.
	4	Sumber Daya Manusia Pemerintah Digital	Implementasi & Koordinasi: Ketiadaan inovasi tematik yang terdokumentasi dan terimplementasi akibat masalah koordinasi/pemahaman teknis.
	5	Kolaborasi Pemerintah Digital	Kemutakhiran & Kepatuhan: Dokumen Arsitektur belum update (tidak selaras proses bisnis terbaru) dan belum sepenuhnya diterapkan sebagai acuan wajib aplikasi.
C. DATA	6	TK Tata Kelola Data SDI	Formalitas: Peta Rencana masih dalam tahap penyusunan, belum ditetapkan resmi dan belum memiliki mekanisme monitoring capaian.
	7	TK Pemanfaatan Informasi Geospasial	Integrasi Anggaran: Anggaran SPBE masih terpisah dan belum selaras dengan peta rencana dan

			RPJMD (tidak teralokasi khusus).
	8	TK Pembangunan Statistik	Formalitas & Monitoring: Belum memiliki jadwal rapat yang baku dan belum memanfaatkan dashboard data untuk monitoring/evaluasi.
	9	TK Pelindungan Data Pribadi	Data & Sertifikasi: Ketiadaan database terintegrasi untuk melacak kompetensi/sertifikasi.
D. KEAMANAN SIBER	10	TK Pelaksanaan Audit Keamanan	Dokumentasi & Aktivitas: Dokumentasi kerjasama (MoU/PKS) belum terhimpun, dan aktivitas inovasi kolaboratif belum berjalan rutin.
	11	TK Keamanan Siber (IKASANDI)	Integrasi & Kualitas: Belum terhubung ke portal nasional; pembaruan data masih tahunan (belum berkala/real-time) dan belum ada pengukuran kualitas rutin.
	12	TK Penerapan Kriptografi	Pemanfaatan Lintas OPD: Penggunaan GIS masih terbatas pada Diskominfo (blank spot) dan penanggulangan bencana (belum seluruh OPD).
	13	TK Kapabilitas Penanganan Insiden	Digitalisasi Proses: Proses pengumpulan dan pengolahan statistik belum sepenuhnya terdigitalisasi untuk menghasilkan data real-time.
E. TEKNOLOGI DIGITAL	14	Aplikasi Pemerintah Digital	Kepatuhan Kritis: Kebijakan (Perbup) belum final; ketiadaan sosialisasi PDP (risiko tinggi); belum ada

			Data Protection Impact Assessment (DPIA) pada aplikasi.
	15	Platform Pemerintah Digital	Frekuensi & Scope: Audit keamanan belum rutin tahunan, dan implementasi audit aplikasi dengan tools BSSN (rencana 2025) belum terwujud.
	16	Fasilitas Infrastruktur Digital	Maturity & Proaktivitas: SOP belum lengkap/mutakhir; belum mencapai IKASANDI level tinggi; ketiadaan simulasi internal.
	17	Jaringan Intra Pemerintah Digital	Cakupan & Manajemen: Belum 100% aplikasi terenkripsi; ketiadaan manajemen kunci terpusat; ketiadaan audit krypto rutin.
F. KETERPADUAN LAYANAN DIGITAL	18	Keterpaduan Proses Bisnis	Kematangan CSIRT: CSIRT belum matang (reaktif), ketiadaan simulasi internal, dan belum memiliki target waktu respon yang terukur.
	19	Interoperabilitas Data	Integrasi: Mayoritas aplikasi masih silo (keterbatasan berbagi data); perlu standarisasi API.
	20	Integrasi Aplikasi & Platform	Keterbatasan Platform: Integrasi masih ad-hoc (VPN) dan belum menjadi platform terpadu dengan SSO/integrasi otomatis.
	21	Portal Layanan Digital Pemerintah	Kepatuhan & Resiliensi: Data center belum berstandar TIER; Ketiadaan DRP & BCP (risiko

			keberlangsungan layanan tinggi).
G. KEPUASAN PENGGUNA	22	Fasilitas Dukungan Pengguna	Resiliensi & Keamanan: Kerentanan terhadap downtime massal; jaringan belum segmented dan dienkripsi penuh (keamanan).
	23	Akomodasi Kebutuhan Pengguna	Finalisasi Proses: Peta proses bisnis belum final (belum divisualisasikan dan notasi proses), sehingga belum bisa menjadi dasar layanan end-to-end.
	24	Tingkat Kepuasan Pengguna	Tata Kelola API: Ketiadaan sistem API Management terpusat untuk mengelola dan mengamankan seluruh pertukaran data.

BAB VI

STRATEGI TRANSFORMASI DIGITAL PEMERINTAH DAERAH

6.1. Strategi Peningkatan Tata Kelola Digital

Berikut merupakan strategi peningkatan Tata Kelola Digital yang disusun berdasarkan hasil identifikasi kondisi eksisting dan kebutuhan penguatan pada masing-masing indikator sebagaimana disajikan dalam Tabel 12.

Tabel 12. Strategi Peningkatan Tata Kelola Digital

Aspek	No	Indikator	PIC Utama	Rekomendasi Kegiatan
A. TATA KELOLA & MANAJEMEN	1	TK Tata Kelola Pemerintah Digital	Bagian Organisasi	1. Finalisasi & Pengesahan Dokumen Strategis Inti: Melakukan Review Kritis terhadap Draft Strategi Transformasi Digital, Peta Rencana, dan Arsitektur SPBE. Mempersiapkan rancangan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) untuk pengesahan. 2. Implementasi Sistem Pengambilan Keputusan Berbasis Data: Merancang dan mengembangkan Dashboard Kinerja SPBE Terpusat dan mewajibkan penggunaannya.
	2	TK Manajemen Layanan Digital Pemerintah	Diskominfo Bidang Aplikasi Informatika	3. Standardisasi ITSM Lanjutan: Menyusun dan mengesahkan Pedoman Manajemen Aset TIK Terpusat, Manajemen Risiko, dan Knowledge Management. Membuat Service Catalog.

6.2. Strategi Penyelenggaraan Pemerintah Digital

Berikut merupakan Strategi Penyelenggaraan Pemerintah Digital yang disusun berdasarkan hasil identifikasi kondisi eksisting dan kebutuhan penguatan pada masing-masing indikator sebagaimana disajikan dalam Tabel 13.

Tabel 13. Strategi Penyelenggaraan Pemerintah Digital

Aspek	No	Indikator	PIC Utama	Rekomendasi Kegiatan
B. PENYELENGGARA	3	Tim Koordinasi Pemerintah Digital	Sekretaris Daerah	5. Peningkatan Efektivitas Tim Koordinasi: Menetapkan Jadwal Rapat Tim Koordinasi PD yang Baku. Mewajibkan penggunaan Dashboard Kinerja SPBE sebagai bahan evaluasi.
	4	Sumber Daya Manusia Pemerintah Digital	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6. Peluncuran Sistem Manajemen Kompetensi Digital (E-Competency): Mendesain dan mengembangkan Database Kompetensi ASN Terpusat. Melakukan Audit Kebutuhan Sertifikasi Spesialis. Inisiatif Baru: Menyusun Program Pemanfaatan & Retensi Pranata Komputer.

	5	Kolaborasi Pemerintah Digital	Diskominfo Bidang Aplikasi Informatika	7. Pembentukan Ekosistem Inovasi Hexa-Helix: Melakukan Audit dan Legalitas Dokumen Kerjasama. Menyelenggarakan Forum Kolaborasi Tahunan. Mempersiapkan lingkungan teknis (API Sandbox).
--	---	-------------------------------	--	---

6.3. Strategi Pembangunan Data

Berikut merupakan Strategi Pembangunan data yang disusun berdasarkan hasil identifikasi kondisi eksisting dan kebutuhan penguatan pada masing-masing indikator sebagaimana disajikan dalam Tabel 14.

Tabel 14. Strategi Pembangunan Data

Aspek	No	Indikator	PIC Utama	Rekomendasi Kegiatan
C. DATA	6	TK Tata Kelola Data SDI	Diskominfo Bidang Statistik	8. Akselerasi Implementasi Satu Data Indonesia (SDI): Menyelesaikan Perbup Wali Data. Membangun Data Warehouse (Single Source of Truth). Mengembangkan Mekanisme Koneksi Teknis ke data.go.id. Inisiatif Baru: Melaksanakan Audit Kualitas dan Konsistensi Data Rutin.
	7	TK Pemanfaatan Informasi Geospasial	Diskominfo Bidang Statistik	Inisiatif Baru: Meluncurkan Program Pelatihan & Pemanfaatan GIS Lintas OPD. Mengembangkan dashboard analitis geospasial.
	8	TK Pembangunan Statistik	Diskominfo Bidang Statistik	Inisiatif Baru: Meluncurkan Digitalisasi Proses Pengumpulan Data Statistik Sektorial untuk mendukung real-time reporting.
	9	TK Pelindungan Data Pribadi	Diskominfo Bidang TIK & Persandian	9. Kepatuhan Kritis PDP & DPIA: Menyelesaikan Finalisasi dan Pengesahan Perbup PDP. Melaksanakan Sosialisasi PDP Wajib Tahunan. Melaksanakan Data Protection Impact Assessment (DPIA) pada 5 aplikasi kritikal.

6.4. Strategi Keamanan Siber

Berikut merupakan Strategi Keamanan Siber yang disusun berdasarkan hasil identifikasi kondisi eksisting dan kebutuhan penguatan pada masing-masing indikator sebagaimana disajikan dalam Tabel 15.

Tabel 15. Strategi Keamanan Siber

Aspek	No	Indikator	PIC Utama	Rekomendasi Kegiatan
D. KEAMANAN SIBER	10	TK Pelaksanaan Audit Keamanan	Inspektorat Daerah	12. Pelaksanaan Audit Keamanan Rutin dan Otomasi: Melaksanakan Audit Aplikasi dengan Tools BSSN. Inisiatif Baru: Membentuk Tim dan SOP untuk Manajemen Patch dan Kerentanan Rutin.
	11	TK Keamanan Siber (IKASANDI)	Diskominfo Bidang TIK & Persandian	11. Pematangan CSIRT dan Table Top Exercise (TTX): Menyelesaikan dan menyempurnakan SOP Penanganan Insiden Siber. Mengembangkan Mekanisme Integrasi Teknis untuk berbagi informasi ancaman dengan CSIRT Nasional.
	12	TK Penerapan Kriptografi	Diskominfo Bidang TIK & Persandian	Inisiatif Baru: Implementasi Sistem Manajemen Kunci Kriptografi Terpusat. Melakukan Audit Kripto Tahunan.
	13	TK Kapabilitas Penanganan Insiden	Diskominfo Bidang TIK & Persandian	11. Pematangan CSIRT dan Table Top Exercise (TTX): Melaksanakan Simulasi TTX Internal Wajib (minimal 2 kali setahun).

6.5. Strategi Teknologi digital

Berikut merupakan Strategi Teknologi Digital yang disusun berdasarkan hasil identifikasi kondisi eksisting dan kebutuhan penguatan pada masing-masing indikator sebagaimana disajikan dalam Tabel 16.

Tabel 16. Strategi Teknologi Digital

Aspek	No	Indikator	PIC Utama	Rekomendasi Kegiatan
E. TEKNOLOGI DIGITAL	14	TK Aplikasi Pemerintah Digital	Inspektorat Daerah	13. Konsolidasi Aplikasi dan Standardisasi API: Menerapkan arsitektur <i>microservices</i> untuk aplikasi kritis. Menerapkan Single Sign-On (SSO) pada seluruh aplikasi prioritas.
	15	TK Platform Pemerintah Digital	Diskominfo Bidang TIK & Persandian	14. Implementasi API Management Terpusat & Governance: Membangun dan mengimplementasikan Sistem API <i>Management</i> Terpusat.
	16	TK Penerapan Fasilitas Infrastruktur Digital	Diskominfo Bidang TIK & Persandian	10. Penguatan Resiliensi Infrastruktur Kritis: Menyusun dan mengesahkan Dokumen DRP (Disaster Recovery Plan) dan BCP (Business Continuity Plan).

				Mengimplementasikan Mekanisme <i>Backup</i> Otomatis ke <i>cloud</i> .
	17	TK Kapabilitas Jaringan Intra Pemerintah Digital	Diskominfo Bidang TIK & Persandian	Inisiatif Baru: Penerapan Software Defined Network (SDN) dan Arsitektur Zero Trust Network untuk meningkatkan keamanan dan segmentasi jaringan.

6.6. Strategi Keterpaduan Layanan Digital

Berikut merupakan Strategi Keterpaduan Layanan Digital yang disusun berdasarkan hasil identifikasi kondisi eksisting dan kebutuhan penguatan pada masing-masing indikator sebagaimana disajikan dalam Tabel 17.

Tabel 17. Strategi Keterpaduan Layanan Digital

Aspek	No	Indikator	PIC Utama	Rekomendasi Kegiatan
F. KETERPADUAN LAYANAN DIGITAL	18	Keterpaduan Proses Bisnis	Bagian Organisasi	15. Finalisasi Proses Bisnis <i>End-to-End</i> : Menyelesaikan Visualisasi Peta Proses Bisnis (BPMN). Melakukan Forum Diskusi Lintas OPD untuk pengesahan proses bisnis <i>end-to-end</i> .
	19	Interoperabilitas Data	Diskominfo Bidang Aplikasi Informatika	14. Implementasi API Management Terpusat & Governance: Membangun sistem API <i>Management</i> Terpusat. Membentuk Komite API <i>Governance</i> .
	20	Integrasi Aplikasi & Platform	Diskominfo Bidang Aplikasi Informatika	13. Konsolidasi Aplikasi dan Standardisasi API: Mendesain arsitektur yang resilien dan menerapkan SSO menyeluruh.
	21	Portal Layanan Digital Pemerintah	Diskominfo Bidang IKP & Kehumasan	16. Pengembangan Portal <i>One-Stop Service</i> : Mengintegrasikan layanan kritikal (MPP Digital/RS) ke portal utama. Merombak tampilan portal menjadi layanan transaksional.

6.7. Strategi Kepuasan Pengguna

Berikut merupakan Strategi Kepuasan Pengguna yang disusun berdasarkan hasil identifikasi kondisi eksisting dan kebutuhan penguatan pada masing-masing indikator sebagaimana disajikan dalam Tabel 18.

Tabel 18. Strategi Kepuasan Pengguna

Aspek	No	Indikator	PIC Utama	Rekomendasi Kegiatan
G. KEPUASAN PENGGUNA	22	Fasilitas Dukungan Pengguna	Bagian Organisasi	17. Pembangunan Sistem Dukungan Terpusat dan Publikasi IKM: Membangun Sistem <i>Ticketing</i> Digital Terpusat dan Chatbot Cerdas.
	23	Akomodasi Kebutuhan Pengguna	Diskominfo Bidang IKP & Kehumasan	18. Formalisasi <i>User-Centric Design</i> (UCD): Menetapkan jadwal FGD Resmi dan Konsultasi Publik Rutin. Membentuk Tim UX/UI di Diskominfo.
	24	Tingkat Kepuasan Pengguna	Diskominfo Bidang IKP & Kehumasan	17. Pembangunan Sistem Dukungan Terpusat dan Publikasi IKM: Membangun Dashboard IKM Terintegrasi dan mewajibkan publikasi hasil IKM melalui satu saluran resmi.

BAB VII

PETA RENCANA

PEMERINTAH DIGITAL 2026–2030

7.1. Roadmap Tahunan (2026–2030)

Berikut merupakan roadmap tahunan Pemerintah Digital tahun 2026–2030 yang memuat rencana dan rekomendasi kegiatan pada setiap aspek serta indikator prioritas pengembangan digital sebagaimana tercantum dalam Tabel 19.

Tabel 19. Roadmap Tahunan (2026–2030)

No	Project/Activities		UIC	Baseline	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
Sasaran 20: Meningkatnya Kualitas pelayanan publik berbasis digital									
Indeks Pelayanan Publik			4.4	4.45	4.5	4.55	4.6	4.65	
IKM			88.6	89	89.3	90	90.3	91	
Indeks Pemerintah Digital			NA	1.7	1.7	2	2	2.3	
INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE IPPD: Implementasi Tata Kelola Pemerintah Digital									
1	TATA KELOLA DAN MANAJEMEN								
	A	Tata Kelola Pemerintah Digital	Bagian Organisasi						
		1	Review Kritis terhadap Draft Strategi Transformasi Digital, Peta Rencana, dan Arsitektur SPBE	Belum ada	1 Kegiatan				
		2	Menyusun Indikator Strategi Transformasi Pemerintah Digital 2026–2030 yang selaras dengan RPJMD dan Renstra OPD.	Belum ada	1 Kegiatan				
		3	Melakukan review tahunan terhadap pencapaian indeks PEMDI dan indikator digitalisasi.	Belum ada	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	

	4	Melakukan Workshop & Assessment Kebutuhan Inovasi Proses Bisnis Tematik		Sudah ada	1 Kegiatan		1 Kegiatan		
	6	Menyusun/Review Dokumen Arsitektur Pemerintah Digital 2026–2030 (6 Arsitektur)		Sudah ada	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
	7	Review Dokumen Peta Rencana Pemerintah Digital 2026–2030		Sudah ada	1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan
B	Manajemen Layanan Digital Pemerintah		Diskominfo Bidang Aplikasi Informatika						
	1	Menetapkan standar SLA/SPM layanan digital lintas OPD.		Belum ada	1 Dokumen				
	2	Reviu Dokumen Pedoman Manajemen Risiko dan Keberlangsungan (BCP dan DRP)		Sudah ada	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		
	3	Reviu Dokumen Pedoman Manajemen Keamanan Informasi		Sudah ada	1 Dokumen				
	4	Reviu Dokumen Pedoman Manajemen Data		Sudah ada	1 Dokumen				
	5	Reviu Dokumen Pedoman Manajemen Aset TIK		Sudah ada		1 Dokumen			
	6	Reviu Dokumen Pedoman Manajemen SDM		Sudah ada			1 Dokumen		
	7	Reviu Dokumen Pedoman Manajemen Pengetahuan		Sudah ada				1 Dokumen	
	8	Reviu Dokumen Pedoman Manajemen Perubahan		Sudah ada					1 Dokumen
	9	Reviu Dokumen Pedoman Manajemen Layanan		Sudah ada	1 Dokumen				
2	PENYELENGGARAAN								
A	Tim Koordinasi Pemerintah Digital		Sekretaris Daerah						

	1	Menetapkan jadwal tetap rapat koordinasi triwulanan dan agenda kerja tahunan Tim Koordinasi.		Sudah ada	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan
	2	Menetapkan SK Tim Pemerintah Digital yang melibatkan seluruh OPD strategis.		Sudah ada	1 Dokumen				
B	Sumber Daya Manusia Pemerintah Digital		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
	1	Mendesain dan mengembangkan Database Kompetensi ASN Terpusat		Belum ada	1 Kegiatan				
	2	Melakukan Audit Kebutuhan Sertifikasi Spesialis		Belum ada		1 Kegiatan	1 Kegiatan		
	3	Menyusun Program Pemanfaatan & Retensi Pranata Komputer.		Belum ada			1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
C	Kolaborasi Pemerintah Digital								
	1	Melakukan Audit dan Legalitas Dokumen Kerjasama	Diskominfo Bidang Aplikasi Informatika	Belum ada	1 Kegiatan				
	2	Menyelenggarakan Forum Kolaborasi Tahunan		Belum ada	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
	3	Menyusun mekanisme sandbox inovasi untuk uji coba solusi digital kolaboratif.		Belum ada		1 Kegiatan		1 Kegiatan	
3	DATA								
A	Tata Kelola Data SDI (Indeks SDI)		Diskominfo Bidang Statistik						
	1	Membangun Data Warehouse dan koneksi teknis ke data.go.id		Sudah ada	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
	2	Melaksanakan Audit Kualitas dan Konsistensi Data Rutin.		Sudah ada	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
B	Operasional Pemanfaatan Informasi		Diskominfo Bidang Statistik						

	Geospasial (Indek JIG)								
	1	Menyusun arsitektur integrasi data spasial dengan data sektoral (melalui API atau WebGIS Service).		Sudah ada	1 Kegiatan	1 Kegiatan			
	2	Meningkatkan frekuensi pembaruan data spasial minimal per semester.		Sudah ada	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan
	3	Melakukan pelatihan teknis GIS lintas OPD untuk interoperabilitas data.		Sudah ada	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
C	Pembangunan Statistik (IPS)		Diskominfo Bidang Statistik						
	1	Mengembangkan dashboard statistik sektoral interaktif yang terhubung dengan BPS.		Belum ada	1 Kegiatan	1 Kegiatan			
	2	Meningkatkan frekuensi publikasi menjadi minimal dua kali setahun.		Sudah ada	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	1 Kegiatan
	3	Menetapkan SOP verifikasi data sektoral dengan BPS secara digital		Belum ada	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan		
D	Pelindungan Data Pribadi		Diskominfo Bidang Statistik						
	1	Menyelesaikan Finalisasi dan Pengesahan Perbup PDP		Belum ada	1 Dokumen				
	2	Membentuk Unit PDP di bawah Bidang Persandian & Keamanan Informasi.		Belum ada		1 Kegiatan			
	3	elaksanakan Sosialisasi PDP Wajib Tahunan		Belum ada		1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
	4	Melaksanakan Data Protection Impact Assessment (DPIA)							
4	KEAMANAN SIBER								
A	Audit Keamanan, Aplikasi dan Infrastruktur Digital		Inspektorat Daerah						

	1	Melaksanakan Audit Aplikasi dengan Tools BSSN		Belum ada	1 Kegiatan	1 Kegiatan			
	2	Membentuk Tim dan SOP untuk Manajemen Patch dan Kerentanan Rutin.		Belum ada		1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
B	Keamanan Siber (IKASANDI)		Diskominfo Bidang TIK & Persandian						
	1	Melengkapi CSIRT dengan SOP, panduan IKASANDI, dan mekanisme eskalasi insiden.		Sudah ada	1 Kegiatan				
	2	Mengajukan akreditasi CSIRT ke BSSN.		Belum ada	1 Kegiatan				
	3	Mengembangkan Mekanisme Integrasi Teknis untuk berbagi informasi ancaman dengan CSIRT Nasional.		Belum ada		1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
C	Penerapan Kriptografi Nasional		Diskominfo Bidang TIK & Persandian						
	1	Melakukan inventarisasi seluruh aplikasi yang belum menggunakan sertifikat PKI Nasional.		Sudah ada	1 Kegiatan				
	2	Implementasi Sistem Manajemen Kunci Kriptografi Terpusat.		Sudah ada	1 Kegiatan				
	3	Melakukan Audit Kripto Tahunan.		Sudah ada		1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
D	Kapabilitas Penanganan Insiden (IKASANDI)		Diskominfo Bidang TIK & Persandian						
	1	Menyusun pedoman latihan keamanan siber tahunan dan format laporan hasil simulasi.		Sudah ada	1 Kegiatan				
	2	Mengintegrasikan hasil latihan ke dalam pembaruan SOP CSIRT.		sudah ada	1 Kegiatan				
	3	Melaksanakan latihan gabungan insiden siber lintas instansi minimal 2 kali per tahun.		Belum ada	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan

5 TEKNOLOGI DIGITAL									
	A	Aplikasi Pemerintah Digital		Diskominfo Bidang Aplikasi Informatika					
	1	Menerapkan arsitektur microservices untuk aplikasi kritikal.		Sudah ada	1 Kegiatan	2 Kegiatan	3 Kegiatan	4 Kegiatan	
	2	Menerapkan Single Sign-On (SSO) pada seluruh aplikasi prioritas.		Sudah ada			1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
	B	Platform Pemerintah Digital		Diskominfo Bidang TIK & Persandian					
	1	Membangun dan mengimplementasikan Sistem API Management Terpusat.		Belum ada		1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
	C	Facilitasi Infrastruktur Pemerintah Digital		Diskominfo Bidang TIK & Persandian					
	1	Melakukan audit infrastruktur dan menyiapkan proses sertifikasi TIER-3 Data Center.		Belum ada	1 Kegiatan				
	2	Menyusun dan mengimplementasikan Dokumen BCP & DRP SPBE Kabupaten.		Belum ada		1 Dokumen	1 Kegiatan		
	3	Mengimplementasikan Mekanisme Backup Otomatis ke cloud.		Belum ada				1 Kegiatan	1 Kegiatan
	D	Jaringan Intra Pemerintah Digital		Diskominfo Bidang TIK & Persandian					
	1	Menyelesaikan perluasan koneksi ke seluruh OPD & UPTD.		Sudah ada	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan		
	2	Menyusun SLA dan SOP pengelolaan jaringan intra pemerintah.		Sudah ada		1 Dokumen			
	3	Menambah sistem redundansi dan pusat monitoring terintegrasi berbasis NOC (Network Operation Center).		Belum ada		1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	

6 KETERPADUAN LAYANAN DIGITAL PEMERINTAH									
	A	Keterpaduan Proses Bisnis Lintas Sektor	Bagian Organisasi						
	1	Melakukan pembaruan dokumen peta proses bisnis berbasis BPMN 2.0.		Belum ada	1 kegiatan				
	2	Melakukan Forum Diskusi Lintas OPD untuk pengesahan proses bisnis end-to-end.		Belum ada		1 kegiatan	1 kegiatan		
	3	Melatih perencana OPD dalam penyusunan proses bisnis lintas sektor berbasis BPMN 2.0.		Belum ada			1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan
	B	Interoperabilitas Data	Diskominfo Bidang Aplikasi Informatika						
	1	Membangun Sistem API Management Terpusat.		Belum ada		1 kegiatan	1 kegiatan		
	2	Membentuk Komite API Governance.		Belum ada			1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan
	C	Integrasi Aplikasi dan Platform	Diskominfo Bidang Aplikasi Informatika						
	1	Menerapkan kebijakan integrasi aplikasi berbasis arsitektur SPBE dan domain resmi pemerintah.		Sudah ada	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan		
	2	Menerapkan SSO menyeluruh.		Belum ada			1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan
	D	Porta Layanan Digital Pemerintahan	Diskominfo Bidang Aplikasi Informatika						
	1	Mengintegrasikan layanan kritikal (MPP Digital/RS) ke portal utama		Sudah ada	1 kegiatan	1 kegiatan			
	2	Menyusun panduan desain UX/UI standar untuk seluruh layanan publik digital provinsi.		Belum ada		1 dokumen			

	3	Mengintegrasikan data statistik pengguna ke dashboard evaluasi SPBE		Belum ada			1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan
7	KEPUASAN PENGGUNA LAYANAN DIGITAL PEMERINTAH								
	A	Fasilitasi Dukungan Pengguna Layanan Digital Pemerintah	Bagian Organisasi	Belum ada		1 kegiatan	1 kegiatan		
	1	Membangun Sistem Ticketing Digital Terpusat.		Belum ada			1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan
	2	engembangkan Chatbot Cerdas.							
	B	Akomodasi Kebutuhan Pengguna Layanan Digital Pemerintah	Diskominfo Bidang IKP & Kehumasan	Belum ada	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan		
	1	Menetapkan jadwal FGD Resmi dan Konsultasi Publik Rutin		Belum ada			1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan
	2	Membentuk Tim UX/UI di Diskominfo.		Belum ada					
	B	Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah	Diskominfo Bidang IKP & Kehumasan						
	1	Mengintegrasikan survei kepuasan pengguna dari seluruh aplikasi ke satu sistem analitik SPBE.		Belum ada	1 kegiatan	1 kegiatan			
	2	Menetapkan SOP evaluasi hasil survei dan mekanisme perbaikan layanan berbasis hasil survei.		Belum ada		1 dokumen			
	3	Menyusun laporan tren kepuasan tahunan sebagai bagian dari laporan IPD daerah.		Belum ada			1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan

7.2. Evaluasi dan Pengukuran Kepuasan Pemerintah Digital

7.2.1 Pengukuran Penilaian Pemerintah Digital

Untuk mengukur dan mengevaluasi tingkat kemajuan implementasi pemerintah digital, digunakan sebuah kerangka kerja yang disebut Model Tingkat Kematangan (*Maturity Model*).



Model ini membantu kita untuk memetakan posisi sebuah institusi dalam perjalanan transformasi digitalnya. Sebagaimana yang diilustrasikan pada tabel 20 di bawah, model ini menggunakan skala 5 (lima) tingkatan, mulai dari tahap paling dasar hingga tahap yang paling ideal. Setiap tingkatan merepresentasikan tahapan evolusi yang spesifik dalam penerapan sistem digital. Mari kita telaah makna dari setiap tingkatan tersebut.

- **Memahami Lima Tingkat Kematangan**

Model ini menyediakan sebuah peta jalan yang jelas bagi lembaga pemerintah untuk menilai kondisi mereka saat ini dan merencanakan langkah-langkah perbaikan di masa depan. Berikut adalah penjabaran dari setiap tingkatan:

Tingkat 1: Rintisan

Pada tingkat **Rintisan**, implementasi sistem digital masih berada pada tahap awal dan bersifat sporadis. Kegiatan yang dilakukan cenderung reaktif, tanpa didasari oleh pedoman yang jelas atau perencanaan yang terarah. Bisa diibaratkan, pada tahap ini, lembaga baru mulai mencoba-coba membangun sesuatu tanpa memiliki cetak biru (blueprint) yang pasti.

Tingkat 2: Terkelola

Di tingkat **Terkelola**, lembaga sudah mulai menunjukkan kemajuan. Implementasi telah berjalan sesuai dengan pedoman dan program yang telah direncanakan. Namun, penerapannya belum menyeluruh; masih ada beberapa proses atau lingkup kerja yang belum tersentuh oleh standarisasi ini. Artinya, sudah ada pedoman, tetapi belum diaplikasikan secara konsisten di semua bagian.

Tingkat 3: Terstandarisasi

Tingkat **Terstandarisasi** menunjukkan bahwa lembaga telah berhasil menerapkan pedoman dan program secara komprehensif di seluruh proses dan lingkup organisasinya. Pada tahap ini, terdapat konsistensi dalam implementasi di berbagai unit kerja, menciptakan sebuah fondasi yang solid dan seragam untuk operasional digital.

Tingkat 4: Terintegrasi/Terpadu

Pada tingkat **Terintegrasi/Terpadu**, fokusnya bergeser dari standarisasi internal ke keterpaduan eksternal. Implementasi tidak hanya konsisten, tetapi juga saling terhubung secara nasional antar sistem atau lembaga. Selain itu, proses **reviu dan evaluasi berkala** mulai dilakukan secara sistematis untuk memastikan semua komponen bekerja secara harmonis dan sesuai dengan tujuan yang lebih besar.

Tingkat 5: Optimum

Ini adalah tingkatan tertinggi dalam model kematangan. Pada tingkat **Optimum**, lembaga tidak lagi hanya menjalankan sistem, tetapi secara proaktif melakukan **optimalisasi kapabilitas** berdasarkan data dan hasil evaluasi. Proses perbaikan terjadi secara berkelanjutan (*continuous improvement*), menjadikan implementasi pemerintah digital lebih efisien, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Di tahap ini, inovasi berbasis data menjadi pendorong utama.

Dengan memahami kelima tingkatan ini, sebuah lembaga dapat mengidentifikasi kelemahannya, menetapkan target yang realistis, dan menyusun strategi yang efektif untuk mencapai tingkat kematangan pemerintah digital yang lebih tinggi.

Tabel 20. Pengukuran Tingkat Kematangan dengan Skala 5

Pengukuran Tingkat Kematangan dengan Skala 5 (Aspek 1 s.d. 8)		
Tingkat Kematangan	Kriteria	Penjelasan
1	Rintisan	Implementasi tanpa pedoman dan tanpa perencanaan yang terarah
2	Terkelola	Implementasi sesuai pedoman dan program yang terarah, namun belum komprehensif untuk semua proses dan lingkup
3	Terstandarisasi	Implementasi secara komprehensif untuk semua proses dan lingkup sesuai pedoman dan program yang terarah
4	Terintegrasi/Terpadu	Implementasi integrasi/keterpaduan nasional, dilakukan reviu/evaluasi berkala
5	Optimum	Optimalisasi kapabilitas implementasi berdasarkan hasil reviu/evaluasi

7.2.2 Skala Penilaian Kepuasan Pengguna

Selain mengukur kematangan dari perspektif internal (penyedia layanan), evaluasi juga harus mengukur persepsi dari perspektif eksternal (pengguna). Untuk tujuan ini, digunakan "Skala Penilaian Kepuasan Pengguna" pada tabel 21 yang berfokus pada analisis **nilai bersih (*net value*)** yang dirasakan oleh pengguna.

Metodologi ini didasarkan pada perhitungan selisih antara persepsi positif (keuntungan) dan persepsi negatif (biaya atau risiko).

Tabel 21. Skala Penilaian Kepuasan Pengguna

Skala Penilaian Kepuasan Pengguna				
Persepsi Keuntungan dan Manfaat (k)				
1	2	3	4	5
Sangat Buruk	Buruk	Cukup	Baik	Sangat Baik
Persepsi Biaya dan Risiko (b)				
5	4	3	2	1
Sangat Buruk	Buruk	Cukup	Baik	Sangat Baik
Net sum Persepsi (k – b)				
-4	-2	0	2	4
Kondisi yang terjadi ketika responden menilai Persepsi Keuntungan dan Manfaat berada pada kategori sangat buruk dan Persepsi Biaya dan Risiko juga sangat buruk	(kondisi antara)	(kondisi netral)	(kondisi antara)	Kondisi yang terjadi ketika responden menilai persepsi keuntungan dan manfaat berada pada kategori sangat baik dan Persepsi Biaya dan Risiko juga sangat baik
Keterangan: Nilai Range -4 hingga 4 dari pengurangan skor hasil kuesioner dari 2 (dua) persepsi.				

A. Komponen Penilaian

Model ini dibangun di atas tiga komponen utama:

- 1. Persepsi Keuntungan dan Manfaat (k)** Variabel ini mengukur penilaian positif pengguna terhadap layanan. Responden memberikan nilai berdasarkan seberapa besar keuntungan atau manfaat yang mereka peroleh. Penilaian menggunakan skala 5 poin, di mana skor tertinggi (**5: Sangat Baik**) merepresentasikan persepsi manfaat terbesar.
- 2. Persepsi Biaya dan Risiko (b)** Variabel ini mengukur penilaian negatif pengguna, seperti biaya, usaha, atau risiko yang harus dikeluarkan. Skala ini diterapkan secara **terbalik** untuk tujuan kalkulasi. Dalam skala ini, nilai **1 (Sangat Baik)** justru merepresentasikan persepsi biaya atau risiko yang sangat rendah, yang merupakan kondisi ideal bagi pengguna. Sebaliknya, nilai **5 (Sangat Buruk)** merepresentasikan biaya atau risiko yang sangat tinggi.
- 3. Net sum Persepsi (k – b)** Ini adalah metrik inti yang digunakan untuk mengkuantifikasi kepuasan bersih. Skor ini diperoleh melalui pengurangan skor **Persepsi Biaya dan Risiko (b)** dari skor **Persepsi Keuntungan dan Manfaat (k)**.

$$\text{Net sum Persepsi} = k - b$$

Hasil perhitungan akan menghasilkan skor dalam rentang nilai **-4 hingga +4**.

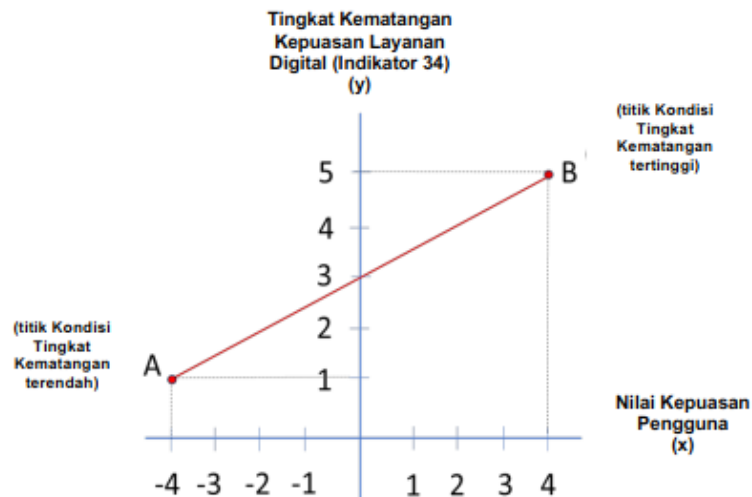
B. Interpretasi Skor Net sum

- Skor +4 (Kondisi Optimum):** Mewakili skenario kepuasan tertinggi. Ini terjadi ketika responden menilai **Keuntungan (k=5)** sebagai "Sangat Baik" dan **Biaya/Risiko (b=1)** juga sebagai "Sangat Baik" (artinya, biaya/risiko sangat rendah).
- Skor 0 (Kondisi Netral):** Menunjukkan kondisi di mana persepsi keuntungan dan biaya/risiko berada dalam keseimbangan (misalnya, k=3 dan b=3). Layanan dianggap memadai, namun tidak memberikan nilai tambah yang signifikan.
- Skor -4 (Kondisi Sangat Buruk):** Mewakili skenario kepuasan terendah. Ini terjadi ketika responden menilai **Keuntungan (k=1)** "Sangat Buruk" sementara **Biaya/Risiko (b=5)** dinilai "Sangat Buruk" (artinya, biaya/risiko sangat tinggi).

Penggunaan "Net sum Persepsi" memungkinkan analisis untuk mendapatkan gambaran holistik mengenai kepuasan pengguna, karena model ini menimbang secara seimbang antara apa yang diperoleh pengguna (manfaat) dan apa yang harus mereka keluarkan (biaya/risiko).

7.2.3 Translasi Skala: Menghubungkan Kepuasan Pengguna dengan Tingkat Kematangan

Translasi Skala :



Gambar 4. Translasi Skala Menghubungkan Kepuasan Pengguna dengan Tingkat Kematangan

Untuk menghitung dan mengonversi nilai tersebut, digunakan digunakan teori linear transformation dengan persamaan $f(x)=ax+b$ atau $y = ax+b$ (Giuseppe Peano, 1888)

Setelah kita memahami dua model penilaian yang terpisah—**Tingkat Kematangan Layanan** (Skala 1 s.d. 5) dan **Nilai Kepuasan Pengguna** (Skala -4 s.d. +4)—langkah selanjutnya adalah menghubungkan kedua hasil pengukuran tersebut. Tujuan dari "Translasi Skala" ini adalah untuk mengonversi skor kepuasan pengguna ke dalam bahasa yang setara dengan tingkat kematangan layanan.

Grafik "Translasi Skala" mengilustrasikan bagaimana dua skala yang berbeda ini dipetakan satu sama lain.

- Sumbu horizontal (**x**) merepresentasikan **Nilai Kepuasan Pengguna**, dengan rentang dari -4 hingga +4.
- Sumbu vertikal (**y**) merepresentasikan **Tingkat Kematangan Kepuasan Layanan Digital**, dengan rentang dari 1 hingga 5.

A. Logika Transformasi Linear

Untuk menghitung dan mengonversi nilai antara dua skala ini, digunakan teori transformasi linear, yang pertama kali diperkenalkan oleh Giuseppe Peano (1888). Metode ini mengasumsikan adanya hubungan linear (garis lurus) yang proporsional antara kedua variabel.

Persamaan yang digunakan adalah: $y = ax + b$

Dimana:

- **y** adalah **Tingkat Kematangan Kepuasan Layanan Digital** (nilai yang ingin kita cari).
- **x** adalah **Nilai Kepuasan Pengguna** (skor *net sum* k-b).
- **a** adalah gradien atau koefisien kemiringan garis.
- **b** adalah intersep atau titik potong pada sumbu y.

B. Menentukan Titik Ekstrem

Seperti yang terlihat pada grafik, kita dapat menentukan dua titik ekstrem yang menghubungkan kedua skala:

1. **Titik A (Kondisi Terendah):** Merepresentasikan kondisi di mana **Nilai Kepuasan Pengguna (x)** berada pada titik terendah, yaitu **-4**. Nilai ini ditranslasikan menjadi **Tingkat Kematangan (y)** terendah, yaitu **1**.
 - Koordinat Titik A = **(-4, 1)**
2. **Titik B (Kondisi Tertinggi):** Merepresentasikan kondisi di mana **Nilai Kepuasan Pengguna (x)** berada pada titik tertinggi, yaitu **+4**. Nilai ini ditranslasikan menjadi **Tingkat Kematangan (y)** tertinggi, yaitu **5**.
 - Koordinat Titik B = **(4, 5)**

Dengan menggunakan dua titik koordinat ini (Titik A dan Titik B), kita dapat menghitung nilai **a** (gradien) dan **b** (intersep) untuk menemukan rumus konversi yang pasti. Proses translasi skala ini memungkinkan lembaga untuk "menerjemahkan" skor kepuasan pengguna yang abstrak (misalnya, +2.5) menjadi sebuah indikator tingkat kematangan yang lebih mudah dipahami dan dapat ditindaklanjuti (misalnya, setara dengan Tingkat 3.5)

7.2.4 Konversi Nilai Kepuasan Pengguna ke Tingkat Kematangan

Setelah memahami konsep transformasi linear, langkah praktis selanjutnya adalah menerjemahkan skor *Net sum Persepsi* (yang berada pada rentang -4 hingga +4) ke dalam skala diskret Tingkat Kematangan (1 hingga 5). Tabel 22 "Konversi Nilai Kepuasan Pengguna ke Tingkat Kematangan Kepuasan Layanan Digital" berfungsi sebagai panduan praktis untuk konversi ini. Tabel ini membagi rentang skor kepuasan pengguna menjadi lima interval yang telah ditentukan, di mana setiap interval berkorespondensi dengan satu tingkat kematangan dan sebuah predikat kualitatif.

A. Pembacaan Tabel Konversi

Tabel 22 ini menyajikan tiga kolom utama yang saling terkait:

No	Nilai Kepuasan Pengguna	Tingkat Kepuasan Layanan Digital (Indikator 34)	Predikat
1	< 2,4	1	Sangat Buruk
2	-2,4 s.d. < -0,8	2	Buruk
3	-0,8 s.d. < 1	3	Cukup
4	1 s.d. < 2,4	4	Baik
5	2,4 s.d. 4,0	5	Sangat Baik

Tabel 22. Konversi Nilai Kepuasan Pengguna

1. **Nilai Kepuasan Pengguna:** Ini adalah skor mentah yang diperoleh dari perhitungan *Net sum Persepsi* ($k - b$).
2. **Tingkat Kepuasan Layanan Digital (Indikator 34):** Ini adalah nilai konversi yang setara pada skala 1-5, yang menyelaraskan persepsi pengguna dengan model kematangan layanan.
3. **Predikat:** Ini adalah deskriptor kualitatif yang merangkum hasil penilaian untuk memudahkan interpretasi.

B. Rincian Interval Konversi

- **Tingkat 1: Sangat Buruk** Layanan dikategorikan pada tingkat terendah jika skor *Net sum Persepsi* yang diperoleh pengguna berada di bawah -2,4. Ini menunjukkan ketidakpuasan yang sangat signifikan, di mana persepsi biaya dan risiko jauh melampaui manfaat yang dirasakan.
- **Tingkat 2: Buruk** Sebuah layanan dinilai "Buruk" ketika skor kepuasan pengguna berada dalam rentang -2,4 hingga kurang dari -0,8. Pada level ini, pengguna masih merasa lebih banyak dirugikan daripada diuntungkan.

- **Tingkat 3: Cukup** Tingkat ini mewakili kondisi netral atau rata-rata. Skor yang diperoleh berada di antara -0,8 hingga kurang dari 1. Ini mengindikasikan bahwa manfaat yang dirasakan pengguna seimbang atau hanya sedikit lebih baik daripada biaya dan risiko yang dikeluarkan.
- **Tingkat 4: Baik** Layanan dinilai "Baik" ketika skor kepuasan menunjukkan nilai positif yang jelas, yaitu dalam rentang 1 hingga kurang dari 2,4. Pengguna secara nyata merasakan manfaat layanan telah melampaui biaya dan risiko.
- **Tingkat 5: Sangat Baik** Ini adalah predikat tertinggi, yang dicapai ketika skor *Net sum Persepsi* berada pada rentang 2,4 hingga 4,0. Ini menunjukkan bahwa pengguna merasakan nilai dan manfaat yang sangat tinggi dari layanan, sementara persepsi terhadap biaya dan risiko sangat minim.

Dengan adanya tabel konversi ini, evaluator dapat dengan cepat dan standar menerjemahkan data kuantitatif kepuasan pengguna menjadi sebuah predikat yang lugas dan dapat ditindaklanjuti, yang juga selaras dengan kerangka kerja evaluasi kematangan secara keseluruhan.

BAB VIII PENUTUP

8.1. Penegasan Visi dan Pijakan Awal Transformasi

Peta Rencana Pemerintah Digital Kabupaten Tanah Laut 2026-2030 ini merupakan **pijakan awal (baseline)** yang krusial bagi transformasi menyeluruh menuju Bagian krasa yang cerdas dan berorientasi layanan publik. Visi utamanya adalah mewujudkan "**Tata Kelola Pemerintahan yang Simpun (Tertata) Berbasis Elektronik, Pelayanan Publik yang Maju (Modern dan Aksesibel), dan Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan Berlandaskan Data dan Teknologi**".

Pencapaian Indeks SPBE Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2023 sebesar **3,12 (Kategori Terintegrasi)** menjadi modal kuat, terutama di Domain Layanan SPBE yang mencapai tingkat Transaksional. Namun, peta rencana ini menegaskan bahwa fokus strategis harus bergeser dari sekadar mengelola aplikasi (SPBE) menuju **mengintegrasikan layanan secara holistik** dan menata aspek manajemen. Kesenjangan utama berada pada Domain Manajemen SPBE (nilai terendah **1,55 - Rintisan**) dan Perlindungan Data Pribadi (belum final). Oleh karena itu, periode 2026-2030 harus dijadikan momentum untuk **memperkuat fondasi tata kelola, keamanan siber, dan sumber daya manusia (SDM)** untuk mencapai target Indeks Pemerintah Digital (IPD)

8.2. Rekomendasi Strategis untuk Kepemimpinan Daerah

Untuk mengakselerasi transformasi digital dan mencapai visi yang ditetapkan, terdapat tiga rekomendasi strategis utama yang membutuhkan dukungan dan komitmen penuh dari Kepemimpinan Daerah:

- **Penyelesaian dan Pemanduan Regulasi Dasar:** Segera finalisasi dan sahkan Dokumen Arsitektur SPBE, Peta Rencana Pemerintah Digital, dan Peraturan Bupati (Perbup) Perlindungan Data Pribadi (PDP). Dokumen-dokumen ini harus menjadi acuan tunggal yang mengikat (mandatori) bagi seluruh perencanaan, penganggaran, dan pembangunan aplikasi di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
- **Investasi Kritis pada Fondasi (Layanan Bersama):** Prioritaskan alokasi anggaran dan SDM untuk pembangunan layanan bersama (Shared Services) dan infrastruktur kritis. Ini mencakup:
 - Pembangunan Data Warehouse (Single Source of Truth) dan koneksi teknis ke portal Satu Data Nasional.

- Implementasi API Management Terpusat sebagai kunci interoperabilitas dan integrasi aplikasi (menghilangkan silo).
- Penyusunan dan implementasi Disaster Recovery Plan (DRP) dan Business Continuity Plan (BCP) untuk memastikan ketahanan layanan kritikal.
- Penguatan SDM dan Budaya Digital: Ubah Manajemen SDM menjadi berbasis kompetensi digital (E-Competency). Wajibkan pelatihan rutin dan sertifikasi bagi Pranata Komputer, serta aktifkan fungsi CSIRT (Computer Security Incident Response Team) melalui latihan simulasi insiden siber tahunan.

8.3. Komitmen dan Parameter Keberhasilan

Keberhasilan Peta Rencana ini akan diukur melalui serangkaian parameter terukur, yang mengintegrasikan kinerja Bagian kras dengan kepuasan publik:

Parameter	Baseline (2024)	Target (2029)	Fokus Strategis
Indeks Pemerintah Digital (IPD)	NA	2,3 (Target Akhir)	Pematangan Tata Kelola dan Manajemen SPBE/PemDI
Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4,40	4,60	Integrasi Layanan (One-Stop Service) dan Penerapan SSO
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,6	90,3	Formalisasi User-Centric Design (UCD) dan Sistem Dukungan Terpusat
Tingkat Kematangan SPBE	3,12 (Terintegrasi)	4,00 (Sangat Baik)	Penuntasan Audit dan Implementasi Manajemen Risiko SPBE ²

Komitmen yang dibutuhkan adalah alokasi anggaran yang terintegrasi dan fokus (tidak lagi terpisah-pisah per OPD) untuk program-program digital prioritas. Transformasi ini bukan hanya tanggung jawab Dinas Kominfo, melainkan tugas kolektif yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah melalui Tim Koordinasi Pemerintah Digital yang aktif dan terstruktur.



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT